

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DALAM PEMILIHAN UMUM 1997 DAN 1999
DI KOTA PEKALONGAN**

Studi Kasus Penurunan Perolehan Suara PPP
Dalam Pemilu 1999 Di Kota Pekalongan

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah



Oleh

FRENTI KURNIYANTI

NIM : 951314008

NIRM : 950051120604120008

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2000

LEMBAR PENGESAHAN

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DALAM PEMILIHAN UMUM 1997 DAN 1999
DI KOTA PEKALONGAN

Studi Kasus Penurunan Perolehan Suara PPP
dalam Pemilu 1999 di Kota Pekalongan

Oleh:

Nama : Frenti Kurniyanti

NIM : 951314008

NIRM : 950051120604120008

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal :

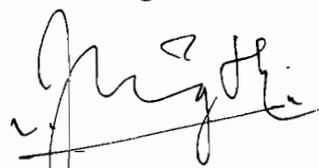
22/01/2001



Drs. S. Adisusilo J.R.

Pembimbing II

Tanggal : 23.1.2001



Dra. Lucia Juningsih, M. Hum.

**PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DALAM PEMILIHAN UMUM 1997 DAN 1999
DI KOTA PEKALONGAN**

Studi Kasus Penurunan Perolehan Suara PPP
dalam Pemilu 1999 di Kota Pekalongan

SKRIPSI

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Oleh:

Nama : Frenti Kurniyanti

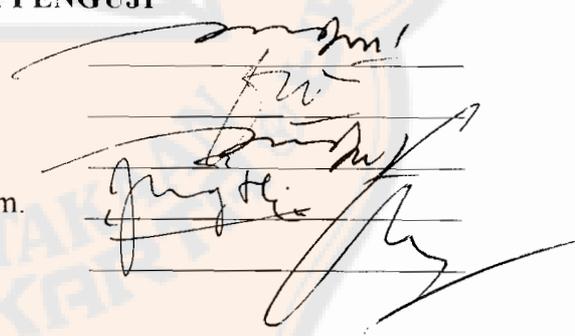
NIM : 951314008

NIRM : 950051120604120008

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
pada tanggal 5 Desember 2000
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

- Ketua : Drs. Sutarjo Adisusilo J.R..
Sekretaris : Drs. B. Musidi, M.Pd.
Anggota : 1. Drs. Sutarjo Adisusilo J.R.
2. Dra. Lucia Juningsih, M. Hum.
3. Drs. A.A. Padi



Yogyakarta, 23 Januari 2001

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

Dekan,



Dr. Paulus Suparno, S.J., M.S./I.

Hukum dan Moral

Seorang penulis berkata, "mempelajari sedjarah adalah omongkosong," "History is bunk" katanya. Penulis ini tidak benar, sedjarah adalah berguna sekali. Dari mempelajari sedjarah orang bisa menemukan hukum, hukum yang menguasai kehidupan manusia. Salah satu hukum itu adalah: tidak ada bangsa besar dan makmur zonder kerja. Terbukti dalam sedjarah segala jaman, bahwa kebesaran-bangsa dan kemakmuran tidak pernah djatuh gratis dari langit. Kebesaran-bangsa dan kemakmuran selalu "KriSTALLisasi" keringat. Ini adalah, hukum, yang kita temukan dari mempelajari sedjarah.

Bangsa Indonesia, tarikhlah moral dari hukum ini.

Soekarno

Pidato hari ulang-tahun proklamasi ke VI

Kupersembahkan

**Yang terkasih Bapak, Ibu, M'At, Indah, Dina dan M'Ismu
Seluruh pembaca**

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia yang melimpah dan kasih sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “Partai Persatuan Pembangunan dalam Pemilihan Umum tahun 1997 dan 1999 di Kota Pekalongan” studi kasus penurunan perolehan suara PPP dalam Pemilu tahun 1999 di Kota Pekalongan. Penyusunan skripsi ini dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S1) di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini saya mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Paulus Suparno, S.J., M.S.T. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
2. Kepala Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang telah memberikan ijin penelitian.
3. Kepala Program Studi Pendidikan sejarah yang telah memberikan ijin penelitian.
4. Drs. S. Adisusilo J.R selaku dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberikan, pengarahan, bimbingan dan masukan selama penyusunan skripsi ini.
5. Dra. Lucia Juningsih, M.Hum. selaku dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan pengarahan, bimbingan dan masukan selama penyusunan skripsi ini.
6. Drs. A.A. Padi, yang telah berkenan memberikan pengarahan dan masukan selama penyusunan skripsi ini.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

7. Bapak H. Machmud Masjkur, Ketua DPC PPP kota Pekalongan periode 1995-2000 yang berkenan memberikan informasi keberadaan PPP di kota Pekalongan
8. Pengurus dan anggota DPC PPP kota Pekalongan yang telah memberikan informasi keberadaan PPP di kota Pekalongan.
9. Segenap Biro Pemerintahan Propinsi DIY, Biro Pemerintahan Propinsi Jawa Tengah, dan Biro Pemerintahan kota Pekalongan yang telah memberikan ijin penelitian.
10. Bapak, ibu, kakak, dan adik-adikku yang senantiasa melimpahkan kasih dan dukungan moril maupun materiil selama saya belajar.
11. Keluarga Elly Ismudharto yang selalu memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi.
12. Bapak HB. Hery Santoso atas dukungan serta bantuan pemberian ide dan peminjaman buku.
13. Teman-teman seperjuangan Pendidikan Sejarah angkatan 1995 atas kerjasamanya.
14. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat saya harapkan demi penyusunan tulisan yang akan datang. Akhirnya penulis berharap semoga hasil penelitian ini berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta, Desember 2000

Penulis

Frenti Kurniyanti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR SUSUNAN PANITIA PENGUJI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
ABSTRAK	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	4
C. Tinjauan Sumber	4
D. Kerangka Konseptual dan Pendekatan	7
E. Metode Penulisan	12
F. Tujuan Penulisan	13
G. Manfaat Penulisan	14
H. Sistematika Penulisan	14
BAB II. KONDISI MASYARAKAT KOTA PEKALONGAN MENJELANG PEMILU TAHUN 1997 DAN 1999	16
A. Sejarah Singkat Kota Pekalongan	16
B. Gambaran Umum Kota Pekalongan	18
1. Kondisi Geografis Kota Pekalongan	18
2. Kondisi Sosial Kota Pekalongan	19

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Kondisi Politik Kota Pekalongan	25
4. Kondisi Ekonomi Kota Pekalongan	30
5. Kondisi Budaya Kota Pekalongan	38
BAB III. PPP DALAM PEMILU TAHUN 1997 DAN 1999 DI KOTA PEKALONGAN	
PEKALONGAN	45
A. PPP dalam Pemilu tahun 1997 di kota Pekalongan	45
1. Persiapan	45
2. Pelaksanaan	54
3. Hasil Keikutsertaan PPP Dalam Pemilu 1997	56
B. PPP Dalam Pemilu Tahun 1999 Di Kota Pekalongan	65
1. Persiapan	65
2. Pelaksanaan	68
3. Hasil Keikutsertaan PPP Dalam Pemilu 1999	69
BAB IV. PENURUNAN PEROLEHAN SUARA PPP DALAM PEMILU 1999 DI KOTA PEKALONGAN	77
A. Faktor yang mempengaruhi Perolehan Suara PPP	77
1. Faktor Pendukung Perolehan Suara PPP	77
2. Faktor Penghambat Perolehan Suara PPP	82
B. Perbandingan Perolehan Suara PPP dalam Pemilu 1997 dan 1999 ..	85
BAB V. KESIMPULAN	88
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR INFORMAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

			hlm
Tabel	2.1	Jumlah Penduduk Menurut Kewarganegaraan Di Kota Pekalongan Tahun 1997	20
Tabel	2.2	Jumlah Penduduk Menurut Kewarganegaraan Di Kota Pekalongan Tahun 1998	20
Tabel	2.3	Jumlah Mutasi Penduduk Di Kota Pekalongan Th 1998	24
Tabel	2.4	Penyebaran Sumber Daya Kekuatan Politik Islam Di Kota Pekalongan Th 1999	29
Tabel	2.5	Jumlah Tenaga Kerja Menurut Jenis Lapangan Pekerjaan di Kota Pekalongan Tahun 1998	35
Tabel	2.6	Penyebaran Sumber Daya Sosial Ekonomi Kehidupan Politik Masyarakat Kota Pekalongan)	37
Tabel	2.7	Banyaknya Perkumpulan Kesenian Di Kota Pekalongan Th 1997 Dan 1998	44
Tabel	3.1	Penghitungan Suara Daerah tingkat II dalam pemilu tahun 1997 anggota DPRD II Kota Pekalongan perwilayah kecamatan/ kelurahan/desa	56
Tabel	3.2	Perbandingan Perolehan Suara Dalam Pemilu Th 1992 Dan 1997 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Untuk Wilayah Daerah Kota Pekalongan	58
Tabel	3.3	Perolehan Suara Pada Pemilu 1999 Per Kecamatan untuk DPRD tingkat II	69
Tabel	3.4	Hasil Perolehan Suara Pemilu Tahun 1999 Untuk Lima Partai Besar Daerah Pemilihan Tingkat II Kota Pekalongan Perwilayah Kelurahan/Kecamatan/Desa	71
Tabel	4.1	Perbandingan Perolehan Suara PPP Dalam Pemilu 1997 Dan 1999 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Untuk Wilayah Daerah Kota Pekalongan	85

ABSTRAK

**PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 1997 DAN 1999
DI KOTA PEKALONGAN**

**Studi kasus Penurunan perolehan suara PPP dalam
Pemilu tahun 1999 di kota Pekalongan**

Oleh: Frenti Kurniyanti

Kota Pekalongan merupakan salah satu kota di Indonesia yang mengalami dinamika masa Pemilu baik pada masa Pemilu ORBA maupun masa reformasi. Di kota Pekalongan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah partai politik (parpol) yang dianggap cocok untuk menyalurkan aspirasi warga kota Pekalongan yang mayoritas beragama Islam karena PPP telah menyatakan diri berazas Islam dan menjadi partai Islam. Selama Pemilu masa ORBA PPP telah berhasil memenangkan Pemilu dengan memperoleh suara terbanyak. Hal ini menunjukkan keistimewaan PPP di kota Pekalongan. Namun demikian, dalam pemilu masa reformasi tahun 1999 PPP telah mengalami penurunan perolehan suara. Dinamika kenaikan dan penurunan perolehan suara PPP menjadi permasalahan yang menarik untuk dianalisis. Namun, kurangnya sumber terutama buku-buku yang membahas topik ini menjadikan skripsi ini menjadi salah satu analisis yang dapat digunakan sebagai sumber pelengkap.

Permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini yaitu 1) bagaimana kondisi geografis, sosial, politik, ekonomi, dan budaya di kota Pekalongan menjelang Pemilu tahun 1997 dan 1999 ? 2) bagaimana PPP di kota Pekalongan dalam Pemilu 1997 dan 1999 ? 3) mengapa PPP di kota Pekalongan dalam Pemilu 1999 mengalami penurunan perolehan suara dibandingkan dengan perolehan suara dalam Pemilu 1997 ?

Tujuan Penelitian ini untuk: 1) menjelaskan kondisi geografis, sosial, politik, ekonomi dan budaya kota Pekalongan menjelang Pemilu tahun 1997 dan 1999, 2) menjelaskan PPP kota Pekalongan dalam Pemilu tahun 1997 dan Pemilu tahun 1999, dan 3) menjelaskan penurunan perolehan suara PPP dalam Pemilu tahun 1999 di kota Pekalongan.

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian yaitu metode sejarah dengan menggunakan langkah-langkah penelitian yaitu: 1) pengumpulan sumber (heuristik), diperoleh dari sumber kepustakaan dan sumber lapangan, 2) kritik sumber (verifikasi) dengan melakukan perbandingan antara sumber atau data lapangan dengan sumber pustaka atau buku. Jika data telah menunjukkan kesesuaian maka dipilih sebagai sumber, 3) interpretasi (penafsiran sumber) merupakan analisis data hasil verifikasi dan 4) historiografi (penulisan sejarah) untuk menyajikan hasil penelitian menjadi satu bentuk tulisan sejarah sehingga dapat mempermudah penyampaian peristiwa kepada pembaca. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosial melalui pendekatan perilaku masyarakat kota Pekalongan untuk mengetahui sikap masyarakat menjelang Pemilu 1999.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Hasil penelitian menunjukkan penurunan perolehan suara PPP dalam Pemilu 1999 sebesar 32,13 % dibandingkan perolehan suara pada Pemilu tahun 1997 telah menunjukkan hasil perilaku masyarakat untuk suka atau tidak suka, menerima atau menolak kehadiran partai. Perilaku masyarakat dalam Pemilu 1999 dilatarbelakangi oleh eksistensi partai lain, aspek sosial, politik, ekonomi dan budaya, peran Kiai, basis-basis PPP dan campur tangan pemerintah. Melalui pendekatan perilaku masyarakat kota Pekalongan tampak bahwa hubungan kehidupan masyarakat kota Pekalongan dengan Pemilu dan hasilnya menunjukkan bahwa PPP hadir sebagai parpol Islam yang dianggap cocok untuk menjadi wakil aspirasi masyarakat.



**PERSATUAN PEMBANGUNAN PARTY IN THE 1997 AND 1999
GENERAL ELECTIONS IN PEKALONGAN CITY**

A Case Study of the Decreasing Poll of PPP in the 1999 General Election in
Pekalongan City

Frenti Kurniyanti

Pekalongan city is one of the cities in Indonesia which has been through dynamic periods in the general election both in the ORBA era and the reformation era. In the Pekalongan city, Persatuan Pembangunan Party is considered as a compatible political party to distribute the aspirations of the city residents of Pekalongan which the majority of the people is Islamic, since PPP has declared themselves as an Islamic party. In the general election in the era of ORBA, PPP has polled the highest vote. This shows the special of PPP in Pekalongan city. Nevertheless, in the general election in the era of ORBA had decreasing poll. The dynamic of the increasing and decreasing poll of PPP becomes an interesting problem to be analyzed. However, the lack of the sources especially in references books which discuss this topic make this thesis becomes one of the analysis which can be used as a complementary source.

The problem formulations presents in this study are: (1) what is the geographic, social, politics, economics, and culture condition in Pekalongan toward the 1997 and 1999 general elections? (2) how was PPP in the 1997 and 1999 general elections? Why the PPP had decreasing poll in 1999 general election compare to the poll in the 1997 general election?

Based on the problem formulations above, the purposes of this study are: (1) to explain the geographic, social, politics, economics, and culture conditions in Pekalongan toward the 1997 and 1999 general elections, (2) to explain the PPP in the 1997 and 1999 general election in Pekalongan and (3) to explain the decreasing poll of PPP in the 1999 general election in Pekalongan.

The methodology utilised in this research is the historical method which has utilised the following steps: 1) sources gathering (heuristic) from the library research and from the field source 2) source criticisms (verification) by comparing the source or the data in the field to the library research or reference books 3) interpretation of the source which is taken from the result of data verification and 4) historiograph to present the result of this study in order to become one of the historical written forms and to facilitate the carrying on the event to the reader. This study also utilised sosial approach through the behavioral approach of the residents of Pekalongan city to find out their behaviour toward the 1999 general election.

The result of this study shows the decreasing poll of PPP in 1999 by 32.13% compared to the poll in the 1997 general election and it shows the citizens' behaviour to like or dislike, accept or reject the existence that party. The citizens' behaviour in 1999 was caused by the existence of others parties, social, politics, economics, culture aspect, the taking part of the Kiai and the

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

government's involvement. Throughout the behavioural approach of the residents in Pekalongan city, it is obvious that there is relationship of the citizens in Pekalongan with the general election, and the result shows that PPP is an Islamic political party which is compatible to represent the aspirations of the city residents.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menjelang berakhirnya abad ke-20, di Indonesia terjadi perubahan dalam berbagai bidang kehidupan seperti bidang politik, sosial dan ekonomi. Perubahan bidang politik disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama, masyarakat mengalami perbaikan sosial dan ekonomi sebagai hasil kongkret dari pembangunan ekonomi orde baru. Secara politik, perbaikan kualitas sosial-ekonomi masyarakat itu menciptakan struktur baru dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Majunya tingkat pendidikan masyarakat mendorong kesadaran masyarakat untuk menuntut perluasan partisipasi politik atau demokratisasi. Kedua, di masyarakat terjadi pendewasaan budaya politik. Pendewasaan budaya politik melalui pendidikan politik di sekolah dan perguruan tinggi dapat mendorong terjadinya perubahan persepsi masyarakat tentang kekuasaan. Masyarakat dapat memberikan penilaian-penilaian tentang kekuasaan dan mengemukakan pemikiran-pemikiran baru ke arah perubahan politik. Ketiga, munculnya sikap dari kalangan kaum elit birokrat (penguasa) untuk lebih terbuka menerima pikiran baru yang lebih demokratis. Keempat, faktor internasional yang amat kondusif seperti globalisasi dan gerakan pluralisme internasional¹. Globalisasi menjadikan dunia sempit, suatu persoalan negara (persoalan lokal) menjadi persoalan bersama umat manusia (persoalan global). Kejadian ini ikut menyumbang terbentuknya gerakan

¹Nung Runua, *Dinamika Politik Indonesia, Dari Pemilu 1992 Sampai Kabinet Pembangunan VI*, Jakarta : Bina Rena Pariwara, 1994, hlm 10 – 15.

pluralisme internasional, artinya situasi internasional ini mendukung perbaikan politik di wilayah-wilayah termasuk Indonesia.

Pemilu tahun 1997 dan 1999 merupakan dua periode pemilu yang penting. Pemilu di Indonesia diselenggarakan lima tahun sekali, sedangkan periode pemilu tahun 1997 dan 1999 telah menunjukkan situasi politik Indonesia yang tidak stabil. Pemilu tahun 1997 diharapkan dapat menyelamatkan bangsa dari krisis moneter yang berkembang menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah, akan tetapi ternyata menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat. Pemilu tahun 1999 telah membuka cakrawala baru bagi politik di Indonesia. Di Pemilu 1999 pelaksanaan demokratisasi di Indonesia mulai tampak, misalnya dengan sistem pemilu multipartai.

Perkembangan politik di Indonesia terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Kota Pekalongan. Kota Pekalongan merupakan bagian propinsi Jawa Tengah yang terletak pada jalur strategis yaitu jalur pantai utara Jawa. Pentingnya membicarakan tentang periode Pemilu tahun 1997 dan 1999 di Kota Pekalongan karena banyak kasus yang terjadi selama periode pemilu ini, misalnya konflik antar Partai Politik (parpol) yang menimbulkan kerusuhan dan konflik antar massa pendukung parpol peserta pemilu di jalan dan kampung-kampung. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di kota Pekalongan bukan saja hadir sebagai parpol peserta pemilu, tetapi menjadi wadah bagi umat Islam Pekalongan untuk memberikan aspirasinya dalam pemilu.

Mayoritas warga Kota Pekalongan adalah umat Islam sehingga kehadiran PPP sebagai parpol Islam sangat didukung. Dukungan dan simpati warga

dilakukan dengan memilih PPP sebagai parpol dan menganggapnya sebagai parpol terbaik dan paling cocok untuk dipilih. Hasil dukungan ditunjukkan dengan kemenangan-kemenangan PPP dalam pemilu-pemilu ORBA di Kota Pekalongan. Kenyataan ini mengurangi eksistensi Golkar sebagai parpol pemerintah di Kota Pekalongan. Penurunan suara Golkar dalam pemilu-pemilu ORBA di Kota Pekalongan mengakibatkan usaha pengurus Golkar untuk melakukan program menarik simpati massa. Program tersebut antara lain melakukan “kuningisasi” yaitu memberikan warna kuning sebagai simbol warna Golkar di berbagai tempat. Demikian pula yang terjadi dalam pemilu tahun 1999, program-program parpol lama maupun baru telah mengurangi massa PPP dan dianggap mengancam keberadaan PPP. Puncak reaksi situasi menjelang pemilu ini dengan timbulnya berbagai kerusuhan dalam kegiatan Pemilu tahun 1997 dan 1999.

Pemilu 1999 adalah wujud upaya perbaikan situasi di Indonesia dengan tujuan mewujudkan demokrasi di Indonesia terutama untuk merubah tatanan elit (pemerintah) yang lebih dari 30 tahun berkuasa. Perubahan pola pemilu dengan sistem distrik dan multi partai memberikan pengaruh bagi PPP. Dalam pemilu 1999 PPP mengalami penurunan suara, hal ini ditunjukkan dengan keunggulan Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan (PDI-P) di atas PPP dan berkurangnya jumlah suara bagi PPP.

Kenaikan dan penurunan jumlah suara yang diperoleh PPP di Kota Pekalongan menggambarkan dinamika perpolitikan masyarakat Kota Pekalongan pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Urutan kedua bagi PPP dalam pemilu 1999 menunjukkan PPP tetap eksis di tengah persaingan

banyak partai Islam. Berbagai hal ini menjadi daya tarik dari PPP untuk menjadi bahan kajian dalam setiap tulisan ilmiah. Tulisan-tulisan dan buku-buku tentang PPP di Kota Pekalongan telah banyak ditulis, namun demikian tulisan tentang PPP selama pemilu tahun 1997 dan 1999 khususnya dalam upaya perolehan suara dan berbagai dinamika politik PPP masih sangat kurang. Penelitian ini dilaksanakan sebagai salah satu usaha untuk memperjelas dan melengkapi berbagai hal tentang PPP khususnya usaha PPP untuk memperoleh suara dalam pemilu tahun 1997 dan 1999 sehingga dapat menambah pengetahuan perpolitikan di Indonesia pada umumnya.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi geografis, sosial, politik, ekonomi dan budaya di Kota Pekalongan menjelang pemilu tahun 1997 dan 1999 ?
2. Bagaimana PPP di Kota Pekalongan dalam pemilu 1997 dan 1999 ?
3. Mengapa PPP di Kota Pekalongan dalam Pemilu 1999 mengalami penurunan perolehan suara dibandingkan dengan perolehan suara dalam Pemilu 1997 ?

C. Tinjauan Sumber

Dalam penelitian ini digunakan pula berbagai sumber buku yang merupakan hasil penelitian dari para peneliti terdahulu. Buku-buku hasil penelitian ini berguna sebagai bahan acuan untuk membantu penyelesaian

penelitian karena tulisan-tulisan tersebut adalah hasil penelitian khususnya tentang Pemilu baik di Indonesia dan di masyarakat Pekalongan. Buku tersebut :

Abdul Munir Mulkan, *Perubahan perilaku politik dan polarisasi umat Islam 1965 – 1987 dalam perspektif sosiologis*, Jakarta : CV. Rajawali, April 1989, membantu melengkapi penelitian dalam hal menganalisis latar belakang umat Islam melakukan kegiatan politik, antara lain latar belakang sosial politik, sosial ekonomi dan sosial politik, yang sangat berhubungan dengan penelitian topik ini. Abdul Munir telah menarik kesimpulan secara umum tanpa melihat pengaruh sosiologis massa Islam dalam politik di wilayah-wilayah tertentu sehingga penelitian ini kurang memberi gambaran jelas tentang masyarakat Islam. Untuk itu penelitian melalui wilayah-wilayah umat Islam yang kecil seperti di Kota Pekalongan ini diharapkan dapat lebih memberikan gambaran nyata tentang perilaku politik dan polarisasi umat Islam, khususnya dalam perspektif sosiologis hingga tahun 1999.

Nung Runua, *Dinamika Politik Indonesia, dari pemilu 1992 sampai Kabinet Pembangunan VI*, Jakarta : Bina Rena Pariwara, 1994. Penelitian Nung Runua tentang berbagai perubahan politik di Indonesia dan berbagai hal yang mendukung perubahan tersebut memberikan penjelasan bahwa dinamika politik di Indonesia erat hubungannya dengan situasi dan kondisi yang terjadi di dalam masyarakat, di dalam negeri dan di luar negeri. Penelitian ini mendukung penelitian yang hendak dilakukan tentang PPP dalam pemilu 1997 dan 1999 di Kota Pekalongan, namun belum sepenuhnya mendukung permasalahan penelitian tentang dinamika masyarakat sebagai pendukung perubahan politik di Indonesia,

hal ini terbukti karena peran masyarakat di berbagai kota-kota kecil dapat mempengaruhi perubahan politik di Indonesia pada umumnya.

R. William Liddle, *Pemilu-Pemilu Orde Baru, Pasang Surut Kekuasaan Politik*, Jakarta : LP3ES, Mei 1992, uraian penelitian William Liddle tentang pelaksanaan pemilu-pemilu ORBA sampai dengan periode pemilu tahun 1992 memberikan acuan yang jelas tentang pelaksanaan pemilu ORBA sehingga sesuai dengan bahan penelitian yang hendak dilakukan khususnya dalam menganalisis pemilu-pemilu ORBA dan parpol-parpolnya, namun kurang mendukung penelitian tentang PPP dalam Pemilu tahun 1997 dan 1999 karena data kurang mendukung penelitian yang bersifat kontemporer sehingga penelitian ini menjadi analisis baru.

Sudirman Tebba, *Islam Orde Baru, Pasang Surut Kekuasaan Politik*, Yogyakarta : Tiara Wacana, Maret 1993. Penelitian ini tentang pasang surut kekuasaan politik Islam pada masa ORBA, dan latar belakang kenaikan dan penurunan perolehan suara PPP dalam pemilu ORBA, stratifikasi sosial masyarakat Islam dan perubahan-perubahan politik Islam. Berbagai hal hasil penelitian ini membantu penelitian yang hendak dilakukan karena permasalahan yang diuraikan sesuai dengan penelitian. Permasalahan yang diuraikan Sudirman Tebba masih perlu dilengkapi, khususnya dinamika masyarakat Islam di kota-kota kecil yang dapat mempengaruhi pasang surutnya kekuasaan politik.

Syamsuddin Harris, dkk., *Kecurangan dan Perlawanan Rakyat dalam Pemilu 1997*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia dan PPW – LIPI, Maret 1999. Kumpulan analisis dari hasil penelitian tokoh-tokoh ini memberikan gambaran tentang kasus-

kasus perlawanan rakyat terhadap pemerintah dalam pemilu 1997 di berbagai wilayah di Indonesia. Gambaran yang diberikan ini memberikan penjelasan tentang reaksi rakyat atas ketidakadilan yang diperolehnya khususnya dalam pemilu 1997. Kasus-kasus hasil penelitian ini sangat sesuai bagi penelitian yang hendak dilakukan karena juga mengemukakan perlawanan-perlawanan rakyat di Pekalongan dalam pemilu 1997. Hal ini sesuai dengan permasalahan yang hendak diteliti, namun kurangnya uraian tentang analisis kenaikan dan penurunan suara PPP dalam pemilu mengakibatkan sumber ini kurang lengkap untuk menjadi bahan referensi. Selain sumber-sumber buku hasil penelitian tersebut, sebagai pelengkap digunakan bahan-bahan dokumenter yang berupa sumber-sumber dari surat kabar dan tabloid tahun 1997 dan 1999.

D. Kerangka Konseptual dan Pendekatan

Istilah demokrasi tidak dapat dipisahkan dari pembicaraan perpolitikan di dalam negara. Demokrasi dikenal untuk memberikan batasan sebuah politik modern. Istilah ini berkembang sejak lahirnya polis-polis di Athena. Negara merupakan hasil kesepakatan rakyat yang diberi kepercayaan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat yang jumlahnya sangat banyak.

Esensi demokrasi secara umum yaitu adanya pengakuan akan hak individu untuk ikut serta dalam proses politik. Namun, tidak semua individu dapat terlibat dalam proses politik karena keadaan ini sulit menciptakan situasi demokratis. Tiap-tiap individu yang memiliki kepentingan berbeda-beda akan saling memaksakan diri dan menimbulkan konflik yang tidak mendukung terciptanya

demokrasi. Pelaksanaan demokrasi dapat efektif, dalam arti mencapai tujuan kemasyarakatan tanpa harus mengorbankan hak-hak individu apabila dilaksanakan dengan sistem perwakilan. Rakyat harus memberikan kepercayaan kepada beberapa orang untuk membentuk badan perwakilan. Pembentukan badan perwakilan dilakukan dengan mengadakan Pemilihan Umum (Pemilu)².

Demokrasi di Indonesia merupakan praktek dari demokrasi Pancasila yang seringkali diberi pengertian bahwa demokrasi Pancasila berbeda dengan demokrasi lain. Pendapat ini tidak dapat dibenarkan karena demokrasi adalah ajaran yang universal, demokrasi berkaitan dengan hak-hak (politik) yang paling mendasar bagi manusia dan memiliki variabel dinamis. Unsur variabel dinamis ini yang membedakan demokrasi di tiap-tiap negara dan bangsa karena menyangkut pada perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat di masing-masing negara dan bangsa tersebut³. Demokrasi Pancasila menggunakan sistem perwakilan dengan adanya Partai politik (parpol) dan Pemilu. Parpol merupakan wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi guna terwujudnya demokrasi.

Masyarakat mempunyai kecenderungan untuk memilih parpol dalam Pemilu yang benar-benar mampu mewakili guna menyalurkan aspirasinya. Masyarakat terdiri dari individu yang mempunyai perilaku. Perilaku merupakan suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya yang mempunyai motivasi untuk mencapai sebuah tujuan. Perilaku ditentukan oleh karakteristik individu. Perilaku-perilaku individu yang ada di masyarakat akan

²Riswandha Imawan, *Membedah politik ORBA*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hlm 79-80

³*ibid.*, hlm ix-xi

membentuk hasil perbuatan. Beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku dapat dirumuskan dalam skema berikut⁴



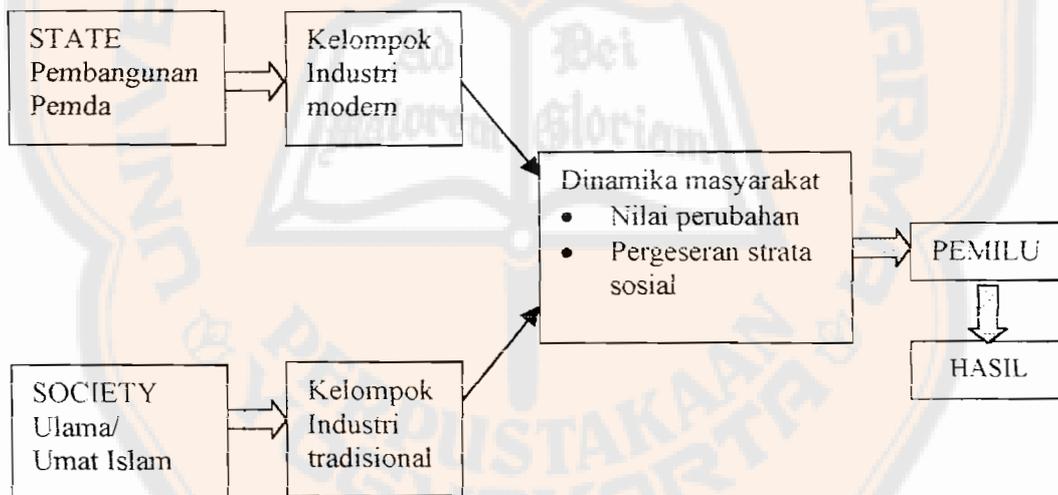
Faktor fisiologis, faktor lingkungan dan faktor psikologis di kota Pekalongan melahirkan perilaku masyarakat untuk memberikan sikap suka atau tidak suka dan menerima atau menolak kehadiran suatu partai di lingkungannya. Di kota Pekalongan sebagian besar masyarakat merupakan umat muslim diantara sebagai santri (masyarakat yang belajar agama Islam dengan sungguh-sungguh di Pondok Pesantren). Peran kiai menciptakan ketaatan ibadah masyarakat. Kiai merupakan sebutan untuk alim ulama Islam. Bagi masyarakat Pekalongan menjalankan perintah Kiai sama dengan menjalankan ibadah agamanya. Pemahaman yang diberikan oleh Kiai melalui pengajian, tabligh akbar membentuk persepsi, kondisi dan kepribadian yang merupakan suatu pelajaran dan motivasi bagi masyarakat.

Perkembangan kelompok industri tradisional ke modern (muslim) di kota Pekalongan menunjukkan peningkatan di tahun 1970-an dengan memanfaatkan

⁴Gibson, Ivanevich, Donnely, *Organisasi dan Manajemen (perilaku Struktur Proses)*, Jakarta: Erlangga, 1984, hlm. 52-55

fasilitas pembangunan ORBA⁵. Perkembangan kelompok ini menunjukkan adanya perubahan kelas sosial yang menimbulkan dinamika dalam masyarakat yaitu adanya perubahan tata nilai masyarakat dari tradisional ke modern. Perubahan-perubahan ini menghadirkan peran agama dalam kehidupan politik dan sosial sehingga bagi masyarakat Pekalongan kehidupan bermasyarakat sama seperti kegiatan politik yaitu diperlakukan sebagai ibadah, sehingga mereka menolak anjuran agar ulama dan masyarakat Islam tidak terlibat langsung dalam proses politik.

Gambaran
hubungan kehidupan masyarakat kota Pekalongan
dengan Pemilu dan hasilnya



Sumber: Syamsuddin Harris, dkk, *Kecurangan dan Perlawanan Rakyat dalam Pemilu 1997*, hlm 19

⁵ Syamsuddin Haris, dkk, *Kecurangan dan perlawanan rakyat dalam pemilu 1977*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan PPW- LIPI, 1999, hlm 18.

Keterangan:

State : pemerintah sebagai kekuatan politik kenegaraan

Borjuasi industri modern: kelompok pendukung pemerintah

Society ulama/umat Islam : mayoritas masyarakat yang berhadapan dengan pemerintah

Borjuasi industri tradisional : kelompok pendukung ulama/umat Islam

⇨ : garis pendukung

→ : garis akibat

⇨ : tujuan dan hasil

Gambaran hubungan kehidupan masyarakat kota Pekalongan dengan Pemilu dan hasilnya menunjukkan bahwa PPP di kota Pekalongan telah menjadi wakil aspirasi masyarakat dalam Pemilu. Hal ini karena PPP merupakan satu-satunya parpol Islam yang dianggap paling cocok menjadi wakil umat Islam yang mayoritas di Pekalongan. Pemberian suara bagi PPP ini merupakan hasil perilaku masyarakat Kota Pekalongan sebagai dampak proses dinamika masyarakat yang dilatar belakangi oleh alasan kemampuan fisiologis, lingkungan dan psikologis.

PPP berupaya untuk mewujudkan manusia yang madani, dalam arti di dirinya mengandung nilai-nilai demokrasi yang perlu diwujudkan dalam segala aspek kehidupan baik dalam kehidupan beragama, kehidupan berpolitik, kehidupan berekonomi dan kehidupan bermasyarakat.

Pemilu 1999 merupakan salah satu perwujudan keinginan masyarakat Indonesia yaitu dapat hidup demokratis yang pancasilais, ada legitimasi pemerintahan yang demokratis, adil dan beradab dengan berakar pada suara

rakyat. Telah diketahui bahwa Pemilu 1997 tidak dapat dikategorikan demokratis, maka pelaksanaan Pemilu 1999 ini cita-cita masyarakat Indonesia sebagian telah terwujud.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosial dan politik. Pendekatan sosial dilakukan untuk mengetahui stratifikasi masyarakat di kota Pekalongan dan peran masing-masing lapisan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat terutama masa Pemilu 1997 dan 1999. Pendekatan politik digunakan untuk mengetahui pelaksanaan kekuasaan, kepemimpinan dan segala kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pemda Pekalongan serta pemimpin partai dalam masa Pemilu 1997 dan 1999.

E. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Langkah-langkah penelitian sejarah.:

1. Pengumpulan sumber (heuristik), diperoleh dari sumber kepustakaan dan sumber lapangan. Sumber kepustakaan bertujuan untuk menjelaskan problematik dan dinamika politik Islam secara teoritis. Sumber dan teori-teori kepustakaan berupa hasil-hasil penelitian para peneliti terdahulu yang sesuai dengan topik dalam bentuk buku-buku. Untuk melengkapi hasil penelitian digunakan sumber lapangan yang diperoleh melalui metode wawancara dengan tokoh partai dan masyarakat.

2. Kritik sumber (verifikasi).

Verifikasi dilakukan dengan melakukan perbandingan antara sumber/data lapangan dengan sumber pustaka/buku. Dari tiap-tiap sumber tersebut data dianalisa menurut tingkat persamaan / kesesuaian isi data. Jika data telah menunjukkan kesesuaian maka dipilih sebagai sumber penelitian.

3. Interpretasi / penafsiran sumber.

Data yang telah diverifikasi kemudian dianalisis sesuai dengan masalah penelitian.

4. Historiografi / penulisan sejarah.

Proses terakhir ini bertujuan untuk menyajikan hasil penelitian menjadi satu bentuk tulisan sejarah sehingga mempermudah penyampaian peristiwa kepada pembaca⁶.

F. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menjelaskan kondisi geografis, sosial, politik, ekonomi, budaya kota Pekalongan menjelang pemilu tahun 1997 dan 1999.
2. Menjelaskan PPP kota Pekalongan dalam pemilu tahun 1997 dan pemilu tahun 1999.
3. Menjelaskan penurunan perolehan suara PPP dalam pemilu tahun 1999 di Kota Pekalongan.

⁶Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Bentang Budaya, 1997, hlm 89-105 dan Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terj: Nugroho Notokusanto, Jakarta: UI-Press, hlm. 34-40

G. Manfaat Penulisan

Penelitian ini bermanfaat :

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Pekalongan

Memberikan masukan tentang program-program dan model-model kampanye partai dalam pemilu sehingga dapat dijadikan acuan untuk melaksanakan Pemilu di Kota Pekalongan pada waktu-waktu mendatang.

2. Bagi DPC PPP Kota Pekalongan

Dapat dipergunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan politik untuk menghadapi pemilu yang akan datang.

3. Bagi Universitas

Memberikan sumbangan tentang penulisan sejarah lokal khususnya mengenai pemilu di kota Pekalongan.

4. Bagi Pembaca

Memperkaya pengetahuan politik khususnya tentang PPP dalam pemilu Periode 1997 dan 1999 di Kota Pekalongan.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 5 bab, masing-masing bab tersebut meliputi : **BAB I**, dijelaskan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, permasalahan, tinjauan sumber, kerangka konseptual dan Pendekatan, metode penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, serta sistematika penulisan. **BAB II** akan dijelaskan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya kota Pekalongan

menjelang pemilu tahun 1997 dan 1999. **BAB III** berisi tentang PPP dalam pemilu tahun 1997 dan PPP dalam pemilu tahun 1999 di Kota Pekalongan. **BAB IV** akan dijelaskan tentang penurunan perolehan suara PPP dalam pemilu tahun 1999, sedangkan **BAB V** berisi kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam bab pendahuluan.



BAB II

KONDISI MASYARAKAT DI KOTA PEKALONGAN MENJELANG

PEMILU TAHUN 1997 DAN 1999

A. Sejarah singkat Kota Pekalongan

Kota Pekalongan merupakan perkembangan daerah-daerah perdagangan di pantai Utara Jawa sejak penguasaan Malaka oleh Portugis tahun 1511. Sebelum kedatangan VOC kota Pekalongan sebagai pusat penangkapan ikan kemudian berkembang menjadi pusat pemukiman dan perdagangan. Kedatangan VOC memberikan perkembangan bagi kota Pekalongan menjadi kota dagang dan mulai terlibat dalam urusan pemerintahan.

Pada masa pemerintah Hindia Belanda penguasaan perdagangan di kota Pekalongan yang semula berada di tangan Hindia Belanda kemudian beralih kepada golongan pengusaha Eropa. Dengan perolehan kekuasaan ini maka liberalisasi ekonomi mulai muncul. Dampaknya para pedagang dari luar daerah Pekalongan tertarik untuk datang dengan tujuan bisnisnya.

Pada Tanggal 21 Februari 1906 Pekalongan menjadi daerah otonom dan dapat mengurus rumah tangganya sendiri¹. Sejak Republik Indonesia (RI) memproklamasikan kemerdekaannya 17 Agustus 1945 Pekalongan berada di bawah kekuasaan pemerintah RI, namun pemerintah Jepang masih menduduki kota menggantikan pemerintah Hindia Belanda. Masyarakat kota Pekalongan

¹Pemda II kota Pekalongan, Pekalongan kota Batik, Pekalongan, 1994, hlm 1-5 dalam Syamsuddin Harris, dkk, *kecurangan dan Perlawanan Rakyat dalam Pemilu 1997*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan PPW-LIPI, 1999, hlm. 19-20

ingin segera berdiri sendiri. Keinginan ini mendapat dukungan pemerintah dan masyarakat kota. Usaha pengusiran Jepang diawali dengan penyerangan. Puncak penyerangan terjadi pada tanggal 3 Oktober 1945 dengan terjadinya peristiwa penurunan bendera Jepang di depan Hotel Merdeka (sekarang kompleks Masjid Syuhada). Keberhasilan hari penyerangan oleh masyarakat Pekalongan ini kemudian diperingati sebagai hari jadi kota Pekalongan dan resmi berdiri sendiri. Peresmian kota ini dikuatkan dengan UU No. 16 tahun 1950 dan diubah menjadi UU No. 13 tahun 1954. Sesuai UU RI No 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah sebutan Kotamadia untuk wilayah Pekalongan diganti dengan sebutan Kota Pekalongan².

Dampak dari perubahan status yaitu kota Pekalongan semakin berkembang dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan budaya³. Dalam bidang politik perkembangan nampak dalam hal pelaksanaan pemerintahan. Hal ini ditunjukkan dengan semakin tertatanya sistem birokrasi pemerintahan kota Pekalongan. Misalnya dalam pelaksanaan pembangunan fisik yang merata. Dalam bidang ekonomi perkembangan nampak pada semakin banyaknya industri perikanan, seperti pengolahan dan pengawetan ikan, serta industri tekstil. Keanekaragaman budaya tampak pada wujud hasil budaya masyarakat. Pada waktu tiap-tiap kelompok pendatang membawa tradisi budaya dengan membawa kesenian (tari dan musik) tradisi ini berkembang dan menjadi kekayaan budaya kota.

² UU RI No. 22 tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah

³Tulisan perjalanan usaha seorang industriawan tradisional kota Pekalongan, dalam Syamsuddin Harris, *ibid.*, hlm 1-5

Perkembangan kedatangan para pedagang di Kota Pekalongan memberikan dampak banyaknya losmen, hotel, rumah toko (ruko) yang dibangun di sepanjang wilayah kota dengan fungsi sebagai tempat singgah dan berjualan. Lama-kelamaan sebagian dari mereka hidup menetap dan menjadi bagian dari masyarakat kota. Pembangunan ini tampak dari beberapa pemukiman yang berciri khas pada adat kebiasaan, seperti pemukiman di Kauman dan Pecinan. Kauman, merupakan wilayah pedagang Islam (Arab) yang juga mayoritas kelompok ulama. Wilayah Kauman berkembang dari pemukiman pedagang muslim menjadi pemukiman masyarakat muslim lokal. Daerah Pecinan (mayoritas dihuni warga Tionghoa) terdapat di wilayah Pekalongan Utara, terletak di sepanjang Sungai Loji. Cirinya rumah dengan model Cina dan terdapat Klenteng.

B. Gambaran Umum Kota Pekalongan

1. Kondisi Geografis kota Pekalongan

Kota Pekalongan merupakan dataran rendah di pantai utara Pulau Jawa. Ketinggian kurang lebih 1 meter diatas permukaan laut dengan posisi geografis antara 6 50'42'' sampai dengan 6 55'44'' Lintang selatan dan 109 37'55'' sampai dengan 109 42'19'' bujur timur serta berkoordinat 510,00 sampai dengan 518,00 km membujur ke arah timur dan 517,75 sampai dengan 526,75 km melintang ke arah selatan⁴.

⁴BPS, *Kota Pekalongan dalam Angka 1997*, Pekalongan: 1998, hlm.2

Kota Pekalongan mempunyai luas 45,25 km² dan terbagi dalam 4 wilayah kecamatan, yaitu kecamatan Pekalongan Utara sebagai wilayah terluas yaitu 14,88 km², Selatan 10,80 km², Barat 10,05 km², dan Timur 9,52 km². Kelurahan/desa di empat Kecamatan adalah 46 wilayah. Wilayah kecamatan Pekalongan Selatan mengalami penambahan wilayah yang berasal dari Kabupaten Pekalongan dan Batang yaitu 9 desa dan 2 Kelurahan. Daerah terpadat adalah wilayah Kecamatan Pekalongan Barat dengan jumlah penduduk 76.912 jiwa, kemudian Pekalongan Utara 64.683 jiwa, Pekalongan Timur 59.813 jiwa dan Pekalongan Selatan 43.602 jiwa⁵.

Secara administratif wilayah Kota Pekalongan memiliki batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang, Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Batang.

2. Kondisi Sosial kota Pekalongan

Jumlah penduduk kota Pekalongan tahun 1997 dan tahun 1998 dapat dilihat pada tabel 2.1 dan tabel 2.2.

⁵*ibid.*, hlm.26

Tabel 2.1
 Jumlah Penduduk menurut kewarganegaraan
 Di Kota Pekalongan tahun 1997

KECAMATAN	WARGA NEGARA INDONESIA	WARGA NEGARA ASING	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
Pekalongan Barat	76.886	26	76.912
Pekalongan Timur	59.485	328	59.813
Pekalongan Selatan	43.591	11	43.602
Pekalongan Utara	64.528	155	64.683
Jumlah	1997	244.490	520
	1996	243.933	715
	1995	243.167	849

Sumber: BPS, Kota Pekalongan dalam Angka 1997, hlm 21

Tabel 2.2
 Jumlah penduduk menurut kewarganegaraan
 Di Kota Pekalongan tahun 1998

KECAMATAN	WARGA NEGARA INDONESIA	WARGA NEGARA ASING	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
Pekalongan Barat	77.002	28	77.030
Pekalongan Timur	59.431	258	59.689
Pekalongan Selatan	43.665	13	43.678
Pekalongan Utara	64.601	153	64.754
JUMLAH	244.601	452	245.151
1997	244.490	520	245.010
1996	243.933	715	244.648
1995	243.167	849	244.016

Sumber: BPS, Kota Pekalongan dalam angka 1998, hlm 25

Warga Negara Asing (WNA) yang berada di kota Pekalongan sebagian besar adalah warga Tionghoa, Arab dan India. Di antaranya telah menjadi warga negara Indonesia (WNI) sedangkan sebagian masih sebagai WNA. Jumlah warga negara asing terbanyak berada di Kecamatan Pekalongan Timur dengan jumlah WNA tahun 1997 ada 328 orang dan tahun 1998 ada 258 orang. Masing-masing wilayah kecamatan memiliki potensi pengembangan ekonomi. Di wilayah kecamatan Pekalongan Timur ekonomi berpusat pada perdagangan. Di kecamatan Pekalongan Barat dan Selatan pada bidang industri tekstil dan pertanian dan di Kecamatan Pekalongan Utara pada perikanan laut. Dengan melihat bahwa pusat perdagangan terdapat di Kecamatan Pekalongan Timur maka wajar jika WNA lebih memilih untuk singgah dan bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Pekalongan Timur sehingga jumlah WNA di wilayah ini lebih banyak.

Kerusuhan yang terjadi di wilayah kota Pekalongan masa Pemilu 1997 sangat berdampak pada kurangnya minat warga terutama WNA untuk tinggal di kota Pekalongan. Hal ini dikarenakan WNA merasa terancam keselamatan keluarga dan bisnis dagangnya. Warga Tionghoa juga sering dianggap sebagai pemicu konflik, walaupun hal ini tidak benar. WNA yang jumlahnya sedikit mengalah dengan meninggalkan kota. Dampaknya seperti tampak dalam tabel 2.2 dan 2.3 arus pergi dan datangnya WNA menyebabkan jumlah WNA menurun sangat tajam.

Kelas-kelas sosial dalam masyarakat Kota Pekalongan dapat berubah akibat perubahan sosial dalam masyarakat. Ulama dan elit birokrat jumlahnya

sedikit, namun peranannya dalam bidang sosial, politik dan ekonomi sangat besar bagi masyarakat Kota Pekalongan hingga pelaksanaan Pemilu tahun 1997 dan 1999.

Ulama di Kota Pekalongan sebagian besar berasal dari Nahdatul Ulama (NU) yang memiliki kemampuan tentang agama Islam. Keberadaan mereka adalah sebagai pemimpin ibadah, penasehat, pembimbing dan pelindung umat Islam. Elit birokrat bekerja di instansi pemerintahan yang bertindak sebagai penghubung antara pemerintah pusat dengan masyarakat. Elit birokrat melaksanakan program-program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah pusat di Kota Pekalongan. Elit birokrat sebagian besar merupakan kaum pendatang dari luar kota.

Industriawan terbagi dalam dua kelompok yaitu kaum industri tradisional dan kaum industri modern. Kaum industri tradisional adalah kaum industriawan yang terdiri dari masyarakat asli (bukan pendatang) yang melaksanakan produksi secara tradisional sedangkan kaum industri modern yaitu industriawan yang melaksanakan produksi secara modern. Selain ulama, elit birokrat dan industriawan ada sebagian masyarakat yang berperan sebagai pendukung para ulama, elit birokrat dan industriawan. Secara umum masyarakat ini terdiri dari buruh pekerja baik industri, perikanan (termasuk pertanian) dan perdagangan.

Para pendatang terpengaruh oleh kehidupan sosial masyarakat Pekalongan. Mereka berusaha untuk menyesuaikan diri agar dapat diterima sebagai warga kota. Contoh bentuk penyesuaian yaitu di perusahaan-perusahaan swasta milik

pendatang akan memberikan jam pendek untuk hari Jumat karena mayoritas karyawannya yang muslim sembahyang Jumat. Data mutasi penduduk dari tahun 1995 hingga tahun 1998 (lihat tabel 2.3) memberikan gambaran bahwa perbandingan jumlah penduduk antara yang datang, pergi dan lahir kurang seimbang. Pendatang di kota Pekalongan bukan hanya masyarakat luar kota Pekalongan tetapi juga warga masyarakat kota Pekalongan yang kembali ke kota kelahirannya. Kedatangan penduduk dilatar belakangi keinginan untuk memperoleh pekerjaan terutama di sektor industri. Data mutasi datang dan pergi penduduk kota Pekalongan yang menurun menunjukkan perkembangan penduduk yang cenderung tetap. Kondisi ini timbul karena kota Pekalongan tahun 1998 (masa Pemilu) tidak stabil. Angka kelahiran yang menunjukkan peningkatan menggambarkan peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama bidang kesehatan karena kesehatan ibu dan anak yang meningkat dapat mengurangi angka kematian bayi dan meningkatkan kelahiran. Namun demikian angka kematian yang meningkat tahun 1998 menunjukkan kurangnya perhatian masyarakat terutama dewasa untuk menjaga kesehatan terhadap penyakit. Para pendatang lebih mendominasi wilayah-wilayah perdagangan di Kota Pekalongan seperti di Kecamatan Pekalongan Timur. Kehadiran para pendatang berakibat semakin beraneka ragam corak kehidupan sosial masyarakat kota.

Tabel 2.3
 Jumlah Mutasi Penduduk
 Di Kota Pekalongan tahun 1998

KECAMATAN	JENIS MUTASI			
	Lahir	Mati	Datang	Pergi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pekalongan Barat	814	452	391	635
Pekalongan Timur	817	472	285	754
Pekalongan Selatan	303	234	115	115
Pekalongan Utara	870	426	334	707
JUMLAH	2.804	1.584	1.125	2.211
1997	2.767	1.535	1.382	2.252
1996	2.802	1.489	1.465	2.181
1995	2.657	1.548	1.855	2.566

Sumber: BPS, *Kota Pekalongan dalam Angka 1998*, Pekalongan: BPS, 1999, hlm 39

Pengaruh Islam dalam bidang sosial di kota Pekalongan tampak dari banyaknya bangunan dan fasilitas ibadah dan pendidikan Islam seperti Masjid, Langgar, Mushola, Pesantren, Madrasah, Perguruan tinggi (STAIN) serta seringnya kebiasaan masyarakat untuk berziarah ke makam-makam kiai dan ulama di berbagai daerah luar kota Pekalongan. Bangunan langgar dan Mushola hampir ada di tiap kampung, bahkan dalam jarak 2 atau 3 rumah dapat ditemukan Mushola dan Langgar.

Sebagai masyarakat pantai yang mandiri campur tangan pemerintah dalam bidang sosial dan politik sangat mempengaruhi perubahan sosial masyarakat. Campur tangan pemerintah dalam bidang sosial mempengaruhi struktur masyarakat dan menimbulkan dinamika dalam kehidupan masyarakat setempat. Pembinaan dan pembangunan yang dilakukan Pemda tidak

membawa banyak perubahan bagi pola pikir dan kehidupan sosial masyarakat. Agama Islam telah berfungsi sebagai pusat bagi kehidupan masyarakat sehingga segala bantuan pemerintah kurang dapat diterima oleh masyarakat karena mereka lebih percaya dan setia kepada para Kiai.

Ikatan masyarakat dengan Kiai berdasarkan pada nilai spiritual dan berdasarkan pada nilai materi. Walau tidak diharuskan secara formal, sesudah mendapat bimbingan Kiai mereka akan memberikan sumbangan materi berupa uang, barang atau jasa. Sumbangan tersebut dianggap sebagai ibadah agama dan Kiai adalah perantara⁶. Contohnya dalam kegiatan kemasyarakatan masyarakat kota Pekalongan akan kurang memperhatikan penyuluhan dari Pemda tentang Keluarga Berencana (KB) karena dianggap bahwa Pemda terlalu campur tangan dalam kehidupannya, sedangkan penyuluhan dari para kiai akan lebih diterima. Menurut masyarakat melaksanakan perkataan Kiai dianggap sama dengan melaksanakan bagian dari ibadahnya. Kebiasaan-kebiasaan masyarakat Kota Pekalongan ini mempengaruhi perilaku-perilaku sosial masyarakat sampai menjelang Pemilu tahun 1997 dan 1999.

3. Kondisi Politik Kota Pekalongan

Dalam dinamika kehidupan bermasyarakat di Kota Pekalongan, agama Islam berperan pula dalam kehidupan politik. Bagi masyarakat Pekalongan aktivitas politik diberlakukan sebagai ibadah. Kesetiaan masyarakat Pekalongan pada agama Islam dan pemimpinnya menyebabkan sering

⁶Syamsuddin Harris, *op. cit.*, hlm. 39

terjadinya pertentangan akibat dari ketidaksesuaian pemikiran dan ketidakpuasan pada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh birokrasi pemerintah daerah (Pemda).

Industrialisasi telah membawa masuk pendapat-pendapat (keyakinan) baru yang dicita-citakan seperti modernisasi yang menciptakan rasionalisasi, liberalisasi, partisipasi dan demokrasi. Salah satu wujud masuknya demokrasi yaitu dengan terlaksananya pemilu di Pekalongan. Pemilu dan permasalahannya di Kota Pekalongan menjadi dinamika perpolitikan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Sistem kepartaian dalam pemilu tahun 1997 dan 1999 menambah kompleksitas perpolitikan di kota ini. Kelompok birokrasi mendukung Golongan Karya (GOLKAR) dan menjadikannya wadah resmi bagi aspirasinya, sedangkan kaum ulama, kaum industri tradisional dan masyarakat umum yang terjalin dalam kepercayaan agama Islam memberikan dukungan kepada partai yang beraspirasi dan berlatar belakang sejarah Islam.

Konflik politik menjelang pemilu tahun 1997 pada dasarnya dilandasi oleh situasi perubahan sosial masyarakat. Proses perubahan sosial terjadi karena perubahan kehidupan sosial masyarakat di Kota Pekalongan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat Industri. Pergeseran sosial ini ikut pula mempengaruhi tata nilai dan pola pikir yang mendasari kehidupan sosial masyarakat. Kerusakan yang terjadi di kota Pekalongan menjelang Pemilu tahun 1997 lebih dilatarbelakangi oleh rasa kecewa dan ketidakpuasan terhadap kebijakan Pemda Kaum birokrat sipil, militer dan kaum teknokrat melakukan

campur tangan masyarakat khususnya dunia usaha untuk mencari pendukung bagi wadah politik mereka yaitu GOLKAR.

Kaum industri modern (Pemilik perusahaan) yang memiliki teknologi modern mendapat banyak bantuan dari Pemda yang berakibat mematikan industri tradisional sehingga kaum industri tradisional banyak yang menekuni usaha lain seperti perdagangan, pengrajin batik dan tenun ikat. Hal ini mengakibatkan kaum ulama, industri tradisional dan masyarakat umum yang terjalin dalam agama Islam bereaksi dengan memberikan dukungan kepada partai yang beraspirasi dan berlatar belakang Islam. Dengan demikian situasi politik berkembang menjadi konflik-konflik horizontal dalam masyarakat. Daerah konflik terutama berada di wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan yaitu di Buaran, Kradenan dan Banyuurip namun massa yang datang juga berasal dari wilayah kecamatan diluar konflik dalam Kota Pekalongan⁷.

Upaya aparat keamanan dan Pemda untuk mengatasi konflik ini mengalami kesulitan. Hal ini terjadi karena emosi masyarakat sudah tidak dapat dikendalikan lagi. Arogansi masyarakat daerah Pekalongan menjelang Pemilu tahun 1997 sudah mengarah ke pertentangan politik, walaupun hal ini dibantah oleh DPC PPP maupun Kapolda Jawa Tengah saat itu, Mayjen Polisi Drs. Harimas AS⁸.

⁷Data seksi SOSPOL Kecamatan Pekalongan Selatan. *Wawasan*, Petugas berhasil atasi kerusuhan, 26 Maret 1997. *Wawasan*, Afan: Kasus Pekalongan Puncak Frustasi Masyarakat di Jateng, 29 Maret 1997, dan *Wawasan*, Pemilik toko masih ngungsi, 29 Maret 1997

⁸*Wawasan*, Kami tidak terlibat Peristiwa Pekalongan, 26 Maret 1997

Menjelang Pemilu tahun 1999 situasi sosial Kota Pekalongan masih tetap menunjukkan sifat dan perilaku masyarakat yang agamis. Krisis moneter dan ekonomi dan tekanan-tekanan kelompok-kelompok OPP menyebabkan situasi politik masyarakat kurang stabil, akibatnya, di dalam masyarakat muncul kembali konflik-konflik sosial yang bernuansa politik

Pemda pada masa pemilu 1999 mulai menunjukkan perannya yang netral. Pengaruh runtuhnya Orde Baru ikut pula menurunkan kinerja kelompok birokrat, sehingga mereka memilih untuk bersikap diam. Pemilu tahun 1999 diikuti oleh banyak partai. Konflik antar parpol yang terjadi dilatarbelakangi oleh pertentangan antar parpol terutama parpol yang berbasis Islam. Parpol-parpol Islam saling bertentangan karena berebut simpati dari warga Islam. Wilayah konflik di Kecamatan Pekalongan Selatan meliputi Banyuurip Alit, Kradenan dan Buaran. Wilayah-wilayah konflik sosial tersebut merupakan basis-basis PPP di Kota Pekalongan pada Pemilu tahun 1997 dan 1999.

Pembangunan di bidang spiritual dan sosial yang mendukung unsur formasi sosial politik tidak merata. Pembangunan masjid lebih terpusat di Pekalongan Barat dan Utara yang merupakan lokasi yang dekat dengan pusat kota (lihat tabel 2.4). Masyarakat di Kecamatan Pekalongan Barat dan Utara lebih bersikap terbuka terhadap campur tangan Pemda sehingga pembangunan fasilitas-fasilitas fisik lebih mudah dilaksanakan dibandingkan dengan pembangunan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Pekalongan Timur dan Selatan.

Tabel 2.4
 Penyebaran Sumber Daya Kekuatan Politik Islam
 di Kota Pekalongan tahun 1999

Sumber Daya	Pekalongan Utara		Pekalongan Barat		Pekalongan Timur		Pekalongan Selatan		Total
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	
Sumber Daya Fisik									
Masjid	19	14,2	25	11,8	16	9,41	13	8,3	73
Mushola	114	85	184	86,8	147	86,5	140	89,2	585
Pondok Pesantren	1	0,7	3	1,41	7	4,1	4	2,5	15
Jumlah	134	100	212	100	170	100	157	100	673
Sumber Daya Manusia									
Kiai / Ustad	5	12,2	19	4,5	54	3,6	25	3,7	103
Pengelola Pondok	1	2,44	3	0,7	7	0,5	4	0,6	15
Santri	35	85,4	395	94,7	1.441	95,9	647	95,7	2.518
Jumlah	41	100	417	100	1.502	100	676	100	2.636

Sumber: Kantor Departemen Agama dalam BPS, *Kota Pekalongan Dalam Angka 1998*, hlm. 137

Dalam tabel 2.4 diketahui bahwa pemusatan fasilitas Islam (selain masjid) banyak terdapat di Kecamatan Pekalongan Timur dan Selatan dengan jumlah Kiai dan santri yang besar. Jumlah Kiai di Kecamatan Pekalongan Timur 54 orang atau 52,4 % dari keseluruhan Kiai di Kota Pekalongan dengan 1.441 orang santri. Kecamatan Pekalongan Selatan jumlah Kiai 25 orang atau 24,3 % dengan 647 orang santri.

Kekuatan politik Islam yang terpusat ini memudahkan pengerahan massa Islam jika sewaktu-waktu diperlukan untuk memperkuat kedudukan Islam

dalam masyarakat. Keterikatan agama Islam dalam berbagai bidang kehidupan termasuk dalam bidang politik semakin meningkatkan eksistensi PPP sebagai satu-satunya parpol Islam untuk tetap menjadi partai mayoritas di kota Pekalongan.

4. Kondisi Ekonomi kota Pekalongan

Pada masa VOC Kota Pekalongan berkembang dari daerah perdagangan menjadi daerah perikanan dan penampungan barang dagang. Pada akhir abad ke-19, terjadi liberalisasi ekonomi yang mengalihkan penguasaan Pekalongan dari kaum birokrat kepada golongan pengusaha Eropa⁹. Campur tangan pemerintah pusat dalam kehidupan ekonomi masyarakat kota Pekalongan mulai sejak masa ORBA berkuasa.

Pembangunan ekonomi di kota Pekalongan diarahkan pada bidang pertanian (termasuk perikanan), perdagangan, dan industri, selanjutnya pada bidang-bidang lain seperti jasa, keuangan, listrik dan pertambangan. Pendapatan daerah diperoleh dari sektor pertanian (perikanan), industri dan perdagangan. Kegiatan perikanan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kota Pekalongan untuk menjadi nelayan, anggota kapal, pemilik kapal dan pedagang. Sebagian besar kebutuhan ikan di Propinsi Jawa Tengah disuplai dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Pekalongan. Pembangunan perikanan kota Pekalongan dipusatkan di wilayah kecamatan Pekalongan Utara. Di wilayah ini dibangun Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan

⁹Syamsuddin Harris, *op.cit.*, hlm.29

(PPNP) sebagai pusat pengembangan perikanan rakyat. Di Pekalongan Utara juga dikembangkan sentra industri kecil perikanan seperti sentra kerupuk udang di Kelurahan Krapyak Kidul, pengolahan ikan di Kelurahan Panjang Wetan dan sentra terasi di desa Pabean. Untuk memperlancar kegiatan industri perikanan dibangun Koperasi Unit Desa (KUD) Makaryo Mino dengan tujuan untuk menyediakan keperluan nelayan sebagai anggotanya dan memasarkan hasil mereka¹⁰. Selain industri, kegiatan perikanan menjadi salah satu komoditi ekspor Kota Pekalongan dengan nilai ekspor untuk tahun 1998 US \$ 657.262.

Kegiatan pembangunan sektor perdagangan di Kota Pekalongan dilaksanakan dengan pengembangan dan pembangunan pasar tradisional. Pembinaan pasar swalayan, penyediaan fasilitas serta pembinaan pedagang kaki lima, pedagang tiban dan kios non pasar juga merupakan konsentrasi pembangunan ekonomi di Pekalongan. Dalam tahun 1995 sampai 1997 telah direncanakan renovasi 3 pasar yaitu Pasar Banyuurip, Pasar Grogolan dan Pasar Banjarsari. Telah direnovasi 1 pasar yaitu Pasar Banyuurip, sedangkan pasar Grogolan dipindah dari Kelurahan Landungsari ke Kelurahan Kebulen Kecamatan Pekalongan Barat dengan tujuan untuk melancarkan lalu lintas. Pasar Banjarsari hingga saat ini renovasi belum terlaksana karena ditolak para pedagang. Pedagang tiban dan pedagang kaki lima banyak berada di jalan Sejahtera, jalan Monomen Juang 45 dan jalan Sultan Agung.

Dalam sektor industri kecil seperti batik, garmen, tenun dan sarung menjadi mata pencaharian yang ditekuni oleh sebagian masyarakat. Industri besar yang

¹⁰*ibid.*, hlm 30

berkembang yaitu industri tekstil. Industri-industri yang berkembang di Pekalongan memunculkan permasalahan baru yaitu pencemaran air akibat limbah industri. Akibat pencemaran air dari limbah industri maka Pemda menganjurkan untuk membuat Unit Pengolahan Limbah (UPL) kepada masyarakat industri. Anjuran Pemda ternyata sulit untuk dilaksanakan karena masyarakat industri merasa bahwa Pemda tidak perlu campur tangan dalam masalah industri mereka. Dengan demikian pembangunan UPL dilaksanakan Pemda dengan dana APBD¹¹.

Sektor pertanian dikembangkan oleh sebagian kecil masyarakat, karena banyak lahan telah berubah fungsi menjadi daerah industri atau pemukiman. Perubahan fungsi tanah pertanian menyebabkan para petani berganti profesi menjadi kaum industriawan. Lahan pertanian terdapat di wilayah-wilayah pinggiran kota, sebagian merupakan tanah bengkok (tanah pertanian yang hasilnya sebagai gaji bagi pejabat kelurahan atau desa). Sektor ekonomi lain yang menjadi mata pencaharian masyarakat yaitu usaha dalam bidang jasa (misalnya sopir, tukang, pengemudi becak), pegawai negeri sipil dan ABRI.

Masa industrialisasi di Kota Pekalongan diawali dengan mulai tumbuhnya industri tekstil bukan mesin di awal tahun 1940-an¹². Pada 1940-an telah ada solidaritas pedagang Islam dalam Sarikat Islam sehingga perkembangan kelompok industri tradisional (muslim) menunjukkan peningkatan tahun 1960-an terutama dengan dukungan koperasi yang diberi hak monopoli dan pemasok

¹¹*ibid.*, hlm. 31-36

¹²*ibid.*, hlm. 18

peralatan industri. Pada tahun 1970-an perkembangan industri tradisional terganggu dengan masuknya kelompok industri modern ke Pekalongan¹³.

Peran masing-masing golongan dalam masyarakat kota Pekalongan mempengaruhi kehidupan ekonomi kota. Kelompok ulama sebagai pemimpin ibadah dan pembimbing masyarakat menjadi panutan bagi masyarakat kota Pekalongan yang mayoritas muslim. Sebagian kelompok ulama juga merupakan kaum industriawan, baik industriawan besar, menengah, maupun kecil. Kelompok ulama industriawan sangat mandiri, bahkan beberapa diantaranya dapat duduk di birokrasi pemerintahan.

Dalam kehidupan ekonomi kelompok ulama memberi sumbangan berupa pengarahan tentang pengaturan perekonomian masyarakat termasuk pemberian zakat bagi fakir miskin. Pengarahan para ulama melalui lembaga-lembaga Islam (masjid, ponpes, sekolah-sekolah Islam, dll) lewat pengajian dan dakwah sangat efektif. Hal ini disebabkan keterikatan warga Pekalongan pada agamanya sehingga memudahkan penerimaan pengarahan. Hasilnya dalam bidang ekonomi terjadi pemerataan pembagian zakat dan kesejahteraan dapat diperoleh para fakir miskin. Di bidang ekonomi Pemda berperan antara lain dalam penetapan peraturan-peraturan perdagangan dan pemberian bantuan bagi kesejahteraan masyarakat seperti pemberian kredit usaha.

Sektor industri menjadi mata pencaharian sebagian masyarakat kota Pekalongan (tampak dalam tabel 2.6). Hal ini bisa dilihat berdasarkan data sampai dengan Agustus 1999 terlihat bahwa sektor industri memberikan lapangan pekerjaan terbanyak bagi masyarakat kota Pekalongan. Jumlah

¹³*Loc. cit.*, hlm. 18

masyarakat Pekalongan yang bekerja di sektor industri sebanyak 24.298 orang, yang terbagi dalam: industri logam, mesin dan kimia (ILMK), industri aneka dan industri hasil pertanian (IHP). ILMK menampung kurang lebih 1758 orang yang terbagi dalam 331 orang pada kelompok industri besar dan 1.427 orang pada kelompok industri kecil. Industri aneka menampung kurang lebih 12.690 orang, terbagi dalam industri besar 1.172 orang, industri menengah 4.190 orang, dan industri kecil 7.328 orang. IHP menampung kurang lebih 9.850 orang yang terbagi dalam 3.081 orang di industri menengah dan 6.769 orang di industri skala kecil¹⁴. Yang dimaksud dengan perusahaan besar yaitu perusahaan yang memiliki nilai investasi lebih dari 5 milyar rupiah, perusahaan menengah memiliki nilai investasi kurang dari / sama dengan 5 milyar rupiah dan lebih dari 200 juta rupiah, sedangkan perusahaan kecil adalah perusahaan yang memiliki nilai investasi kurang dari / sama dengan 200 juta rupiah.¹⁵ Masyarakat yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 2.776 orang, perdagangan 2.427 orang, bangunan 1.212 orang, jasa 1.073 orang, keuangan 1.012 orang, listrik 106 orang dan pertambangan 29 orang¹⁶.

¹⁴Dep. Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekalongan, dalam BPS, *Kota Pekalongan dalam Angka 1998*, BPS, hlm. 179

¹⁵*ibid.*, hlm. 179

¹⁶*ibid.*, hlm 48

Tabel 2.5
Jumlah Tenaga Kerja Menurut Jenis Lapangan Pekerjaan
Di Kota Pekalongan Tahun 1998

No	Lapangan Pekerjaan	Jumlah	Prosentase
1.	Pertanian (termasuk Perikanan)	2.776	8,2
2.	Pertambangan	29	0,08
3.	Industri	24.298	71,8
4.	Listrik	106	0,3
5.	Bangunan	1.212	3,6
6.	Perdagangan	2.427	7,2
7.	Angkutan dan Perhubungan	903	2,7
8.	Keuangan	1.012	2,10
9.	Jasa dll	1.073	3,2
Jumlah		33.836	

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Pekalongan dalam *Kota Pekalongan Dalam Angka 1998*, hlm. 48,179

Industri dan pertanian (meliputi sektor perikanan laut) telah menghasilkan pendapatan ekspor bagi kota Pekalongan. Pada tahun 1997 ekspor untuk industri bernilai US \$ 3.203.945.775,79 yang berupa (sarung palekat, garment, *bed clothing*, *white fabric*, kain batik, batik printing dan kain sarung). Ekspor untuk pertanian, yaitu ekspor hasil laut bernilai US \$ 2.239.922,50¹⁷. Ekspor tahun 1998 (dihitung Agustus 1999) untuk industri bernilai US \$ 5.886.210,73 (berupa sarung palekat, garment, kain batik, batik printing, kain sarung) dan ekspor pertanian (hasil laut) bernilai US \$ 657.262¹⁸.

Dengan beraneka ragamnya mata pencaharian masyarakat kota Pekalongan menyebabkan terjadi penyebaran kehidupan ekonomi yang kurang

¹⁷Dep. Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekalongan, dalam BPS, *Kota Pekalongan dalam Angka 1997*, BPS, hlm. 190

¹⁸BPS, *op.cit.*, hlm.187

merata. Keanekaragaman ini terjadi karena latar belakang faktor fisiologis (kemampuan fisik dan mental) untuk bekerja, faktor lingkungannya yang mendukung dan kurang mendukung untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan faktor psikologis yaitu keinginan untuk hidup lebih baik. Berbagai faktor ini mendukung perilaku masyarakat kota untuk bekerja dan mengelola penghasilannya sehingga dapat hidup sejahtera.

Dalam tabel 2.6 data penyebaran sumber daya sosial ekonomi penduduk kota Pekalongan yang kurang merata menunjukkan adanya pengaruh faktor-faktor fisiologis, lingkungan dan psikologis. Salah satu faktor lingkungan yang muncul yaitu kekurangaktifan Pemda untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya sehingga di beberapa Kecamatan masih terdapat pengusaha lemah, fakir miskin, gelandangan, tuna susila dan keluarga di lingkungan tidak layak dengan prosentase untuk kecamatan Pekalongan Utara 23,10 %, Pekalongan Barat 9,93 %, Pekalongan Timur 11,5 % dan Pekalongan Selatan 1,21 %. Pembangunan yang dilakukan Pemda dengan dana APBD lebih diutamakan pada pembangunan dan perbaikan sarana serta fasilitas umum seperti gedung pemerintahan, jalan-jalan, sekolah-sekolah negeri, puskesma dan pemberian bantuan berupa kredit modal kepada kelompok-kelompok industri kecil. Hal ini mengakibatkan masyarakat yang kurang sejahtera merasa tidak diperhatikan. Situasi ini menimbulkan pertentangan antara masyarakat dengan Pemda.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 2.6
Penyebaran Sumber Daya Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Pekalongan

Sumber daya			Penduduk	Pengusaha lemah	Fakir Miskin	Gelandangan	Tuna susila	Keluarga di kondisi/perumahan tidak layak	Keluarga Sejahtera
PKL Utara	97	Jml	64.683	47	2.105	37	134	331	62.029
		%	100	0,07	3,2	0,06	0,2	0,5	95,9
	98	Jml	64.754	47	2.215	37	134	13.075	49.246
		%	100	0,07	3,4	0,06	0,2	20,2	76,1
PKL Barat	97	Jml	76.912	82	1.656	89	-	506	74.579
		%	100	0,01	2,1	0,1	-	0,6	96,10
	98	Jml	77.030	294	6.761	-	-	597	69.378
		%	100	0,4	8,8	-	-	0,8	90,1
PKL Timur	97	Jml	59.813	513	1.398	20	-	878	57.004
		%	100	0,8	2,3	0,03	-	1,5	95,3
	98	Jml	59.689	1837	3.737	20	-	1.300	52.795
		%	100	3,1	6,3	0,03	-	2,2	88,4
PKL Selatan	97	Jml	43.602	38	-	-	-	169	43.395
		%	100	0,1	-	-	-	0,4	99,5
	98	Jml	43.678	238	-	-	-	293	43.147
		%	100	0,5	-	-	-	0,7	98,8
Total	97	Jml	245.010	680	5.159	146	134	1.884	237.007
		%	100	0,3	2,1	0,06	0,05	0,8	96,7
	98	Jml	245.151	2.416	12.713	15.265	134	57	214.566
		%	100	0,4	5,2	0,02	0,05	6,2	87,5

Sumber : BPS, Kota Pekalongan dalam Angka 1997, BPS, hlm 21,118,120,193 dan BPS, Kota Pekalongan dalam Angka 1998, BPS, hlm 122,124,188-190

Wilayah Pekalongan Barat dan Utara yang dekat dengan pusat pemerintahan dan pusat kota ternyata tidak menjamin meratanya kesejahteraan. Kurang meratanya kesejahteraan dikarenakan lapangan pekerjaan yang tersedia kurang mampu menampung tenaga kerja yang ada, keengganan untuk bekerja dan kurangnya perhatian Pemda untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Sebaliknya wilayah Kecamatan Timur dan Selatan yang mempunyai wilayah pedesaan justru mempunyai pemerataan kesejahteraan perekonomian karena lapangan pekerjaan dalam bidang pertanian masih banyak didukung pula oleh kecenderungan sifat masyarakat di wilayah kecamatan Timur dan Selatan sebagai masyarakat mandiri dan pekerja keras. Keadaan ini mempengaruhi eksistensi partai mayoritas yang memperoleh kursi terbanyak di pemerintahan. Penyebaran sumber daya sosial ekonomi kota Pekalongan yang kurang merata mempengaruhi pembentukan wilayah-wilayah yang menjadi kekuatan/basis PPP dan partai-partai lain. Penyebaran sumber daya ekonomi yang kurang merata menjadi alasan partai untuk menarik simpatik massa dengan mengangkat pemerataan pembangunan sebagai program partai.

5. Kondisi Budaya Kota Pekalongan

Clifford Geertz melalui dasar tinjauan kulturalnya menjelaskan bahwa pola perilaku budaya masyarakat di Pulau Jawa yang 90 % penduduknya menganut agama Islam terbagi dalam 3 kelompok pola tindakan. Masing-masing kelompok berhubungan satu dengan yang lain serta sebagian di antaranya mempunyai hubungan dengan nilai-nilai yang berlaku dan tradisi-tradisi

sebelum masuknya Islam ke Indonesia. Tiga kelompok masyarakat tersebut disebut Abangan, Priyayi dan Santri. Abangan yaitu sebutan bagi kelompok masyarakat muslim yang dianggap kurang terlalu fanatik dan kurang patuh terhadap ajaran agamanya¹⁹. Pola perilaku abangan cenderung didasarkan pada pola perilaku sinkretisme antara kepercayaan sebelum masuknya Islam dan dengan Islam sendiri. Nilai keislaman dalam kelompok abangan lebih longgar. Orang-orang abangan banyak tinggal di pedesaan sebagai petani²⁰.

Pola perilaku priyayi adalah perilaku seorang / sekelompok muslim yang lebih didasarkan pada sistem nilai agama Hindu dan aristokrasi barat Belanda. Perilakunya hampir sama dengan abangan yaitu dalam kelonggaran nilai keislaman. Pola perilaku ini dilakukan para birokrat dan pegawai pemerintah yang umumnya tinggal di kota-kota. Selanjutnya, pola perilaku santri adalah pola perilaku yang lebih ditekankan kepada perilaku seorang atau sekelompok orang (Muslim) yang didasarkan pada sistem nilai yang berlaku dalam ajaran agama Islam. Kaum santri banyak tinggal di kota sebagai pedagang atau petani-petani kaya²¹. Di Kota Pekalongan perilaku ini juga berkembang.

Menanggapi tinjauan kultural Clifford Geertz untuk membedakan masyarakat Islam di Jawa para cendekiawan muslim mengemukakan bahwa pola perilaku priyayi lebih menekankan pada latar belakang status sosial atau

¹⁹ Zaini Muchtarom, *Santri dan abangan di Jawa*, Jilid II, Jakarta : INIS, 1988, hlm 10, buku ini merupakan tesis hasil penyelidikan Zaini tentang istilah Santri dan Abangan di Jawa yang dikemukakan oleh Clifford Geertz dengan berdasar pada pendapat-pendapat para cendekiawan dan ilmuwan muslim.

²⁰ Clifford Geertz dalam Abdul Munir Mulkan, *Perubahan perilaku politik dan polarisasi Ummat Islam 1965-1987, dalam perspektif sosiologis*, Jakarta : Rajawali, 1989, hlm. 57-58

²¹ *loc.cit.*,

golongan sosial dalam masyarakat Jawa dan bukan pada perilaku keagamaan seperti halnya santri dan abangan. Istilah santri dan Abangan disebut juga kelompok Islam kolot dan modern. Namun demikian, kelompok-kelompok ini tetap dianggap sebagai masyarakat muslim yang beragama dan taat pada agama Islam. Hanya latar belakang sosial dan kulturalnya yang menciptakan timbulnya kelompok-kelompok ini²²

Masuknya modernisasi melalui industrialisasi di Kodya Pekalongan telah menimbulkan pergeseran-pergeseran baru antara kelompok Islam ini terutama kelompok abangan dan kelompok santri. Hal ini terjadi karena ada mobilitas sosial, mobilitas agama dan mobilitas budaya. Di lingkungan abangan terjadi peningkatan kesadaran agama akibat proses dakwah yang dilaksanakan organisasi-organisasi Islam. Di lingkungan Santri terjadi penurunan tradisi kesantrian, contohnya banyak anak-anak kaum Santri tidak lagi dimasukkan ke Pondok Pesantren tetapi ke sekolah-sekolah non agama dan berbaur dengan anak-anak kaum abangan²³.

Kota Pekalongan memiliki masyarakat yang majemuk, ada banyak etnis dan budaya yang masing-masing berbeda. Sebagai kelompok mayoritas masyarakat Islam, Pekalongan lebih mudah untuk mengembangkan budayanya namun tidak menutup diri dari kebudayaan masyarakat non Islam lain seperti budaya masyarakat Tionghoa, dan budaya Kristen atau Katolik (etnis Tionghoa dan pribumi). Dengan demikian, kondisi sosial budaya masyarakat kota

²² Zaini Muchtarom, *op.cit.*, hlm 11

²³ Kuntowijoyo, *Paradigma Islam, Interpretasi Untuk Aksi*, Bandung: Mizan, 1991, hlm. 237 Yang Memperjelas Tentang Tradisi Budaya Islam

Pekalongan lebih menunjukkan adanya toleransi budaya dan akulturasi budaya. Masuknya pendatang dengan berbagai budaya dan adat kebiasaannya secara tidak langsung ikut mempengaruhi perkembangan budaya setempat.

Toleransi antar masyarakat di wilayah kota Pekalongan ini seringkali terganggu oleh ulah oknum yang tidak bertanggungjawab terlebih pada waktu menjelang pemilu 1997 dan 1999. Situasi politik yang tidak menentu, didukung oleh keadaan ekonomi yang kurang stabil membuat emosi masyarakat mudah tersulut. Keadaan ini berakibat pada perpecahan hubungan kultural masyarakat. Masing-masing kelompok masyarakat menaruh kecurigaan pada berbagai hal yang dilakukan kelompok lain. Masyarakat asli yang mayoritas Muslim merasa kuatir jika budaya yang dibawa para pendatang akan menjadi ancaman eksistensi Islam dalam masyarakat. Hal ini menjadikan sikap masyarakat muslim cenderung mengisolasi diri dengan cara peningkatan dakwah pada pengajian-pengajian.

Dalam hal budaya politik, budaya masyarakat Pekalongan lebih berdasarkan pada nilai-nilai kebiasaan dan perilaku mereka. Nilai-nilai kebiasaan ini masih diwarnai oleh suasana paternalisme maupun patrimonialisme. Contohnya budaya ewuh pakewuh muncul saat kebudayaan orang enggan menyampaikan kritik kepada mereka yang dianggap lebih tua. Budaya ini semakin kuat karena unsur kekuatan agama dan pemimpinnya. Masyarakat kota Pekalongan lebih suka untuk meniru kebiasaan pemimpin agamanya.

Di kota Pekalongan terdapat berbagai perkumpulan-perkumpulan kesenian. Sebagian besar perkumpulan kesenian menampilkan kesenian yang lebih berwarna islami. Data dalam tabel 2.7 menunjukkan perkumpulan-perkumpulan kesenian yang berkembang di kota ini. Namun, data tersebut belum termasuk banyaknya perkumpulan kesenian yang tidak terdata di BPS Kota Pekalongan.

Kondisi geografis Kota Pekalongan sebagai wilayah dataran rendah di pantai utara pulau Jawa sangat mempengaruhi kondisi sosial, politik, ekonomi dan budaya di kota ini menjelang Pemilu 1997 dan 1999. Menjelang Pemilu 1997 dan 1999 kondisi politik lebih mendominasi kehidupan masyarakat kota. Hal ini ditunjukkan dengan semakin kuatnya alasan politik dalam setiap pemberian bantuan sosial, bantuan untuk peningkatan industri maupun latar belakang politik yang mewarnai setiap kegiatan kebudayaan. Contohnya: masyarakat di Kota Pekalongan akan lebih suka mendapatkan bantuan dari para ulama dan Kiai daripada bantuan dari Pemda. Masyarakat cenderung berpersepsi negatif terhadap bantuan Pemda dengan melihat bahwa setiap bantuan Pemda ada hubungannya dengan keterikatan pada parpol pemerintah. Di dalam kegiatan budaya tampak dalam kegiatan kesenian menjelang Pemilu. Pertunjukkan kesenian diadakan dalam rangka memberikan hiburan bagi warga masyarakat. Pertunjukkan ini diselenggarakan oleh kelompok-kelompok parpol dengan harapan bahwa hiburan ini akan mengembangkan minat masyarakat untuk mengikuti dan memilih parpol yang bersangkutan. Melihat kondisi di kota Pekalongan dapat dikatakan bahwa perpolitikan di kota Pekalongan tidak

dapat dilepaskan dengan kehidupan masyarakat yang dipengaruhi oleh peran para kelompok-kelompok masyarakat.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 2.7
Banyaknya Perkumpulan-perkumpulan Kesenian
Di Kota Pekalongan 1997 dan 1998

Kecamatan (1)	Lawak / Dagelan (2)		Wayang Orang (3)		Ketoprak (4)		Drama / Teater (5)		Bend (6)		Keron- cong (7)		Group Tari (8)		Kerawi- tan (9)		Pencak- silat (10)		Kasidah (11)	
	97	98	97	98	97	98	97	98	97	98	97	98	97	98	97	98	97	98	97	98
	Pekalongan Barat	3	-	-	-	-	-	2	2	3	5	2	1	4	1	2	2	1	-	1
Pekalongan Timur	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	1	-	3	-	2	-	1	1	-	-
Pekalongan Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Pekalongan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	1	-	2	2	-	-
Jumlah	3	-	-	-	-	-	4	3	3	7	5	1	15	3	5	2	4	3	2	1

BAB III

PPP DALAM PEMILU TAHUN 1997 DAN 1999

DI KOTA PEKALONGAN

A. PPP Dalam Pemilu 1997 Di Kota Pekalongan

1. Persiapan

PPP kota Pekalongan terbentuk sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah ORBA tahun 1973 tentang fusi partai. PPP kota Pekalongan merupakan hasil fusi dari partai NU, Parmusi (Partai Muslimin Indonesia), PSII (Partai Sarikat Islam Indonesia), dan Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah). PPP berazas Islam. Secara organisatoris sebagai Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang berarti berada di bawah Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di Propinsi dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di Jakarta. Tujuan Partai yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridai Allah SWT dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, mewujudkan tatanan politik yang demokratis, dilandasi oleh akhlakul Karimah serta mengembangkan kehidupan yang Islami¹

Keikutsertaan PPP menjadi partai politik (parpol) karena PPP ingin ikut menjalankan pemerintahan di Indonesia. Salah satu langkah untuk melaksanakan maksud tersebut yaitu dengan ikut Pemilihan Umum (Pemilu). Di Pemilu akan ditentukan jumlah wakil PPP yang duduk di pemerintahan,

¹Tim Penelitian dan Pengembangan KOMPAS, *Partai-partai Politik Indonesia, Ideologi, Strategi dan Program*, Jakarta: Gramedia, 1999, hlm. 161

kemudian para wakil ini menjadi wakil PPP untuk menyalurkan aspirasi masyarakat ke pemerintahan.

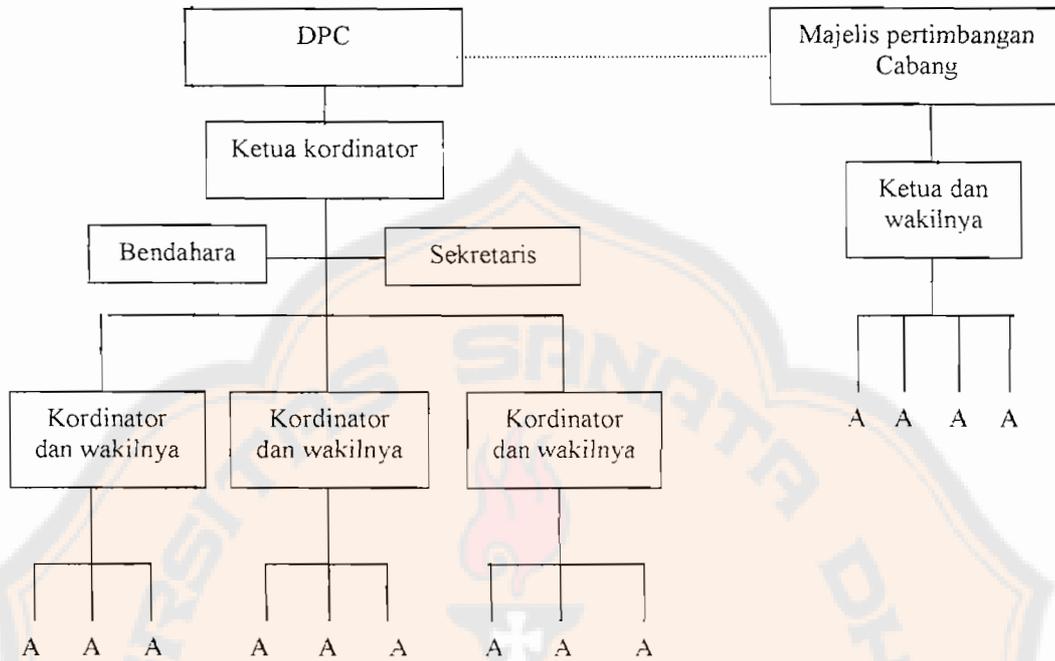
Cita-cita dan visi politik PPP adalah terwujudnya suatu masyarakat yang madani, yang adil dan makmur, yang diridai *Allah Subhanahu wa Ta'ala, baldatun Thayyibatun wa rabbun ghafur* dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. PPP mendasarkan perjuangannya atas nilai-nilai dasar Ketuhanan, Kemanusiaan, Kerakyatan, Keadilan, Kebenaran dan Kejujuran. Cita-cita dan visi PPP tersebut diartikan bahwa PPP berupaya membangun masyarakat yang sejahtera lahir dan batin dalam kehidupan bangsa Indonesia, yaitu manusia yang bertaqwa kepada *Allah Subhanatu wa Ta'ala*. Dengan nilai-nilai tersebut terwujud manusia dan masyarakat yang saling harga menghargai dan sayang menyayangi tanpa membedakan ras, suku, agama, kasta, warna kulit, bahasa, dan sebagainya².

DPC terdiri dari ketua koordinator, ketua dan wakil-wakilnya, bendahara dan wakil-wakilnya serta bagian-bagian sesuai kepentingan cabang. Tiap-tiap Dewan pimpinan didampingi oleh Majelis Pertimbangan yang terdiri atas ketua, wakil dan anggotanya³. Majelis Pertimbangan anggotanya adalah para Kiai-Kiai karismatik. Skema selengkapnya tergambar dibawah ini.

² *ibid.*, hlm. 164

³ Wawancara dengan KH. Machmud Masjur, Ketua DPC PPP Kota Pekalongan Periode 1995 - 2000, 01 Februari 2000

Skema struktur Pengurus DPC PPP
Kota Pekalongan



Keterangan:

- Hubungan hirarkhis langsung
- Hubungan tidak langsung (konsultatif)

PPP kota Pekalongan dalam Pemilu 1997 berkeinginan untuk kembali memperoleh suara terbanyak sekaligus dapat memenangkan Pemilu. Dalam upaya mencapai keinginan tersebut PPP melakukan berbagai persiapan-persiapan antara lain: persiapan program kerja, strategi, pemilihan kader, kampanye dan penertiban administrasi kantor.

Persiapan program diawali dengan penyusunan program kerja partai yaitu sebagai berikut:

1. Ingin menegakkan nilai-nilai Ketuhanan YME, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Mendorong upaya pemantapan wawasan kebangsaan dalam rangka integrasi nasional, pembentukan identitas nasional, serta memupuk loyalitas kepada bangsa dan negara, di tengah-tengah pergaulan internasional sebagaimana tercermin dalam pembukaan UUD'45. Namun demikian, segala hal yang dapat mengarah nasionalisme sempit, chauvinisme dan anarki perlu terus diwaspadai.
3. Mengupayakan fungsionalisasi lembaga-lembaga politik, terutama lembaga tinggi dan tertinggi negara, khususnya MPR / DPR-RI agar sebagai penyalur aspirasi masyarakat dapat terus ditingkatkan peranannya. Oleh karena itu pemisahan antara pimpinan DPR-RI dan MPR-RI merupakan upaya yang tepat untuk pemberdayaan lembaga-lembaga atau badan perwakilan dan permusyawaratan rakyat, sehingga dapat menghindarkan masyarakat untuk mencari saluran lain yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam UUD'45.
4. Mengupayakan agar pimpinan maupun keanggotaan lembaga-lembaga tinggi negara seperti BPK, MA dan DPA perlu dipilih langsung oleh DPR, yang diresmikan oleh presiden sebagai Kepala Negara. Begitu juga

perlunya presiden berkonsultasi dengan DPR ketika akan menyusun kabinetnya. Sementara itu, PPP membuka diri untuk perdebatan mengenai pemilihan presiden, gubernur, Bupati/walikota dan jabatan-jabatan publik lainnya yang dipilih rakyat secara langsung.

5. Berusaha untuk meningkatkan terwujudnya tatanan budaya politik yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Karena itu PPP terus memperjuangkan pemantapan kedudukan dan peranan partai-partai politik dalam rangka pelaksanaan fungsi-fungsi dasar organisasi sosial politik yang wajar dan mandiri dengan kedaulatan berada di tangan anggota, untuk itu, penyempurnaan UU Kepartaian menjadi agenda yang mendesak.
6. Meningkatkan peranan DPRD I / DPRD II yang jelas berbeda dengan jajaran eksekutif serta mendesak terwujudnya aparatur penyelenggaraan pemerintah negara yang lebih efisien, efektif, bersih, jujur dan berwibawa yang dilandasi dengan semangat dan sikap pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan yang bertanggung jawab.
7. Memperjuangkan wadah-wadah pengembangan peran serta masyarakat agar dapat bersama-sama merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan menikmati hasil-hasil pembangunan dalam rangka pemantapan dinamika politik yang sehat dan stabil.
8. Mengembangkan komunikasi politik timbal balik antarmasyarakat, antara masyarakat dengan pemerintah, sehingga arus komunikasi dan informasi dapat berjalan secara seimbang.

9. Memperjuangkan agar di tingkat daerah dan tingkat desa ditumbuh kembangkan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa yang demokratis, bersih, jujur dan berwibawa, sehingga partisipasi rakyat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan Pemanfaatan hasil-hasil pembangunan dapat benar-benar terwujud. Untuk itu PPP akan memperjuangkan untuk meninjau kembali UU No.5/1974 dan UU No. 5/1979.
10. Meningkatkan dan mengembangkan hubungan kerjasama luar negeri dengan tetap mempertahankan politik luar negeri yang bebas dan aktif dan berorientasi saling hormat menghormati dan harga menghargai.
11. Meningkatkan peran serta dalam memasyarakatkan dan memperkuat ASEAN serta menyukseskan program-programnya, dalam rangka mempererat kerjasama regional. Begitu juga peran aktif Indonesia dalam organisasi konferensi Islam dan badan-badan internasional lainnya untuk meningkatkan perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Dengan kata lain PPP mendorong agar Indonesia ikut aktif menyukseskan terwujudnya tata dunia baru⁴.

Berdasarkan program kerja partai PPP bekerja untuk mengupayakan terlaksananya program-program tersebut. Program-program ini disosialisasikan kepada masyarakat lewat tulisan-tulisan dalam buku-buku, dan lewat kampanye PPP. Melalui program kerjanya PPP ingin menunjukkan

⁴Tim Penelitian dan Pengembangan Kompas. *op.cit.*.hlm. 165-166

pada OPP lain bahwa PPP berjuang untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Kondisi menjelang Pemilu 1997 di kota Pekalongan menampakkan kondisi yang tidak stabil. Oleh sebab itu PPP mempersiapkan taktik dan strategi untuk tetap menarik simpati masyarakat tanpa dipengaruhi kondisi kota. Pendukung PPP di Kota Pekalongan 80 % adalah umat Islam tradisional yang masih paternalistik sehingga kunci suksesnya ada pada tokoh kharismatik seperti ulama / kiai atau tokoh masyarakat yang berpengaruh.

Menjelang Pemilu 1997 PPP kembali mendekati para tokoh Kiai dan ulama untuk memperkuat PPP dalam usaha menarik simpati massa Islam di kota Pekalongan. Para ulama dan Kiai yang dilibatkan dalam persiapan Pemilu PPP tidak hanya berasal dari wilayah kota Pekalongan tetapi juga dari wilayah-wilayah di Kabupaten Pekalongan dan luar kota Pekalongan. Para Kiai dan ulama ini dilibatkan dalam kepengurusan partai, anggota Majelis Pertimbangan dan sebagai juru dakwah dalam kampanye.

Pemilihan kader dan fungsionaris PPP dilaksanakan melalui proses seleksi kader dengan AD/ART. Setiap kader harus memiliki syarat yaitu menguasai prinsip-prinsip perjuangan PPP, yaitu ibadah, kebenaran-kejujuran dan Keadilan, Musyawarah, Persamaan, Persatuan, dan Kebersamaan, Istiqomah/konsisten, dan Prinsip *Amar Ma'ruf Nahyi Munkar*⁵.

Persiapan kampanye PPP kota Pekalongan dalam Pemilu 1997 meliputi persiapan memilih juru kampanye, persiapan keamanan untuk

⁵ Wawancara, KH Machmud Masjkur, 01 Februari 2000

mengamankan kampanye dan persiapan fasilitas kampanye. Dalam mempersiapkan juru kampanye PPP memilih para Kiai kharismatik. Para pengamat politik seperti Drs Arbi Sanit dan Dr Afan Gaffar melihat keberhasilan kampanye PPP dalam pemilu 1997 ditunjukkan dengan keberhasilan PPP menarik masa dalam kampanye serta keberhasilan peningkatan perolehan suara PPP dalam Pemilu. PPP dalam pemilu 1997 benar-benar ingin menunjukkan asas jujur dan adil (Jurdil) dalam Pemilu. Program-program PPP yang banyak difokuskan pada perubahan telah menarik perhatian masyarakat sehingga setiap kampanye selalu mampu menghadirkan massa dalam jumlah besar⁶

Menjelang pelaksanaan Pemilu kegiatan-kegiatan keagamaan dilakukan PPP seperti pengajian dan tabligh akbar. Sejumlah Kiai ikut berperan dalam keberhasilan kegiatan ini. Para Kiai tersebut antara lain Kiai Afifudin (Pimpinan Pondok Pesantren The Holy Al-Furqon, Mangkang Semarang), KH Tohir dan K. Munawir. Para Kiai ini hampir setiap malam mengisi pengajian sebagai kegiatan memperingati hari lahir PPP. Keikutsertaan sejumlah Kiai ini menurut ketua DPC PPP Kota Pekalongan KH. Machmud Masjkur bukan penugasan dari pengurus partai melainkan gagasan masyarakat. Mereka mengadakan kegiatan secara spontanitas dengan dana gotong royong, karena PPP tidak pernah mengadakan kegiatan pengajian bermuatan politik. Kegiatan yang dilaksanakan partai adalah konsolidasi⁷

⁶Wawasan, , Jumlah Massa bukan cermin perolehan suara, 5 Juni 1997

⁷ KH. Machmud Masjkur dalam SM 26 Maret 1997, *Wawasan*, Sukses PPP Di Pekalongan Karena Dukungan Kiai, 5 Juni 1997

Dalam mengamankan kegiatan kampanye PPP tidak hanya berharap pada aparat keamanan. Tetapi juga mengarah Satgas PPP kota Pekalongan dibawah pimpinan komandan Satgas Rozali Maksum. Selama masa kampanye PPP di Kota Pekalongan banyak terjadi peristiwa kerusuhan yang sering membawa korban jiwa. Kerusuhan-kerusuhan sering terjadi karena pertentangan berebut pendukung partai, saling ejek antar pendukung partai, serta perwujudan emosi masyarakat yang kecewa karena janji partai yang tidak terpenuhi.

Menanggapi soal kerusuhan masa kampanye di Pekalongan bahwa terjadi akibat isi pengajian yang mencela OPP lain seorang tokoh ulama yaitu Cholil Bisri menyatakan bahwa kita boleh saja sesekali kita mencela, karena jika isinya hanya memuji saja, justru berbahaya. Jika ada yang “ngelem” terus dan tidak memperoleh apa yang diharapkan, akhirnya malah frustrasi. Perkataan Cholil Bisri ini diartikan bahwa perlunya ada kesabaran diri untuk introspeksi pada diri sendiri bahwa setelah kita mengetahui posisi sendiri dan posisi orang lain kita tidak akan salah menilai yang jika hal ini terjadi akan menimbulkan kerusuhan⁸.

Persiapan fasilitas kampanye juga dilakukan PPP untuk mendukung kelancaran kegiatan kampanye. Fasilitas yang dipersiapkan antara lain berupa alat transportasi, gedung/lapangan pertemuan, dan kantor pemberitaan. Persiapan-persiapan menjelang Pemilu juga dilakukan PPP kota Pekalongan dengan membenahi diri. Kegiatan pembenahan intern partai dilakukan dengan pembenahan dan penegasan kembali struktur organisasi DPC,

⁸Wawasan, Pemilik toko masih ngungsi, Pekalongan kembali Normal, 29 Maret 1997

peningkatan kemampuan para pengurus partai untuk mengelola partai dan persiapan pencarian dana untuk kegiatan partai.

Persiapan masa pelaksanaan Pemilu 1997 di kota Pekalongan cukup lancar. Situasi politik nasional yang kurang stabil tidak mengurangi kegiatan persiapan ini. Kelancaran persiapan tidak terlepas dari dukungan Pemda kota Pekalongan yang bersimpati dengan PPP dan dukungan masyarakat Islam di basis-basis PPP kota Pekalongan. Contohnya masyarakat ikut bergotong royong memasang umbul-umbul dan bendera partai untuk meramaikan masa kampanye dan kesukarelaan masyarakat untuk menyewakan lapangan dan alat transportasinya demi kelancaran kegiatan kampanye.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan Pemilu diawali dengan masa kampanye. Pada masa kampanye para kontestan akan menerangkan program dan rencana masing-masing partai kepada calon pemilih. Tujuannya adalah merekrut sebanyak mungkin pemilih untuk memilih dan menaruh tanda gambar partai pada hari pemilihan di tempat pemungutan suara (TPS).

Menjelang pelaksanaan Pemilu tahun 1997 di kota Pekalongan dilaksanakan pendaftaran pemilih. Pendaftaran pemilih dilakukan melalui kunjungan panitia pemilu ke rumah-rumah, selanjutnya pemilih mendaftarkan diri ke lokasi-lokasi pendaftaran menjelang pemilu. Dari data yang diperoleh jumlah keseluruhan pemilih yang terdaftar di kota Pekalongan adalah 161.454, dengan rincian pemilih untuk Kecamatan

Pekalongan Barat 52.715, Pekalongan Utara 41.880, Pekalongan Timur 39.049 dan Pekalongan Selatan 27.810.

Jumlah tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersedia mengalami penambahan beberapa TPS karena disesuaikan dengan jumlah pendaftar di masing-masing wilayah. Jumlah TPS di kecamatan Pekalongan Barat 123 TPS, Kecamatan Pekalongan Utara 102 TPS, Kecamatan Pekalongan Timur 96 dan Pekalongan Selatan 66 TPS. Jumlah TPS keseluruhan 387 TPS. Di tiap-tiap TPS masing-masing OPP diwakili saksi-saksi dengan tujuan untuk memantau pelaksanaan pemilu agar berjalan Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER). Para saksi diambil dari wakil ketiga OPP.

Pemilu 1997 dilaksanakan tanggal 29 Mei 1997. Selama kampanye sampai dengan pelaksanaan pemilu PPP Kota Pekalongan berkeinginan untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan luber. Namun demikian, dalam pelaksanaannya telah terjadi konflik yang menimbulkan korban termasuk pendukung PPP. Hal ini mengakibatkan kerugian bagi PPP karena pemilih berkurang. Konflik antar OPP maupun antar masa OPP yang terjadi kebanyakan dikarena perebutan masa. Kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di wilayah Pekalongan tidak semuanya terdata karena hampir disetiap kegiatan menjelang Pemilu para panitia penyelenggara tidak melaporkan kegiatannya.

Peraturan pemilu 1997 telah membatasi kebebasan OPP. Walaupun tidak secara langsung Golkar (sebagai OPP milik pemerintah) mendapatkan fasilitas yang lebih besar dibandingkan PPP dan PDI. Hal ini sangat

merugikan partai. Dengan adanya penyimpangan tersebut kegiatan Pemilu tidak dapat berjalan maksimal karena setiap usaha untuk mewujudkan Pemilu yang benar-benar jujur dan luber akan berhadapan dengan kebijakan pemerintah yang sering berakibat terjadinya konflik.

3. Hasil Keikutsertaan PPP Dalam Pemilu 1997

Kekuatan PPP di kota Pekalongan ditunjukkan dengan hasil perolehan suara yang dicapai dalam pemilu 1997. Hasil perolehan suara tiap-tiap wilayah kecamatan / kelurahan / desa dalam pemilu 1997 juga masih menunjukkan eksistensi PPP tampak dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.1

Penghitungan Suara Daerah Tingkat II Dalam Pemilu Tahun 1997
 Anggota DPRD II Kota Pekalongan Per Wilayah Kecamatan / Kelurahan / Desa

No	KEC/KEL/DESA	PEROLEHAN SUARA						Total Suara
		PPP	%	Golkar	%	PDI	%	
I	PEKALONGAN BARAT							
1	Kel. Kraton Kidul	721	50,49	691	48,39	16	1,12	1.428
2	“ Kergon	2.579	64,12	1.410	35,06	33	0,82	4.022
3	“ Sapuro	1.609	53,44	1.349	44,80	53	1,76	3.011
4	“ Kebulen	1.800	76,33	540	21,81	46	1,86	2.386
5	“ Kramat Sari	1.775	51,60	1.617	47,00	48	1,40	3.440
6	“ Bendan	2.219	44,58	2.663	53,49	96	1,93	4.978
7	“ Podosugih	2.934	46,68	2.900	49,10	72	1,22	5.906
8	“ Medono	4.149	60,04	2.712	39,25	49	0,71	6.910
9	Desa Tirto	2.300	55,37	1.793	43,16	61	1,47	4.154
10	Desa Tegal Rejo	1.542	48,31	1.629	51,03	21	0,66	3.192
11	“ Bumirejo	298	38,75	456	59,30	15	1,95	769
12	“ Pringlangu	2.176	71,67	838	27,60	22	0,73	3.036
13	“ Pasirsari	2.113	60,18	1.295	36,88	103	2,94	3.511
Jumlah		26.305	56,17	19.893	42,48	635	1,35	46.833
II	PEKALONGAN UTARA							
1	Kel. Panjang Wetan	4.400	40,38	6.190	56,72	323	2,96	10.913
2	“ Kandang Panjang	1.873	33,47	3.541	63,28	182	3,25	5.596
3	“ Dukuh	813	29,13	1.927	69,04	51	1,83	2.791

4	“ Kraton Lor	1.215	40,14	1.767	58,37	45	1,49	3.027
5	“ Krapyak Kidul	2.179	78,15	567	20,34	42	1,51	2.788
6	“ “ Lor	3.209	66,56	1.464	30,37	148	3,07	4.821
7	Desa Degayu	1.715	63,17	977	35,98	23	0,85	2.715
8	“ Pabean	1.394	77,19	399	22,09	13	0,72	1.806
9	“ Bandengan	1.375	52,82	1.175	45,14	53	2,04	2.603
Jumlah		18.173	49,07	18.007	48,56	886	2,37	37.060
III	PEKALONGAN TIMUR							
1	Kel. Landungsari	2.686	70,94	1.030	27,21	70	1,85	3.786
2	“ Noyontaan	2.164	50,16	2.009	46,57	141	3,27	4.314
3	“ Keputran	1.443	53,54	1.202	44,60	50	1,86	2.695
4	“ Kauman	912	71,53	359	28,16	4	0,31	1.275
5	“ Sampangan	829	38,05	1.324	60,76	26	1,19	2.179
6	“ Sugihwaras	986	49,87	949	48,00	42	2,13	1.977
7	“ Poncol	2.324	53,72	1.837	42,47	165	3,81	4.326
8	“ Klego	2.888	70,32	1.174	28,59	45	1,09	4.107
9	Desa Dekoro	2.453	72,70	840	24,79	85	2,51	3.388
10	“ Gamer	956	59,16	644	39,85	16	0,99	1.616
11	“ Karangmalang	382	35,73	672	62,86	15	1,40	1.069
12	“ Baros	604	48,79	630	50,89	4	0,32	1.238
13	“ Sokorejo	939	61,94	568	37,47	9	0,59	1.516
Jumlah		19.576	58,46	13.238	39,54	672	2,00	33.486
IV	PEKALONGAN SELATAN							
1	Kel. Kradenan	3.243	86,53	493	13,15	12	0,32	3.748
2	“ Banyuurip Alit	2.060	91,64	172	7,65	16	0,71	2.248
3	Desa Banyuurip Ageng	2.113	90,65	199	8,54	19	0,81	2.331
4	“ Buaran	1.461	90,58	149	9,24	3	0,18	1.613
5	“ Jenggot	4.164	87,26	574	12,03	34	0,71	4.772
6	“ Kertoharjo	892	70,13	333	26,18	47	3,69	1.272
7	“ Kuripan Kidul	929	66,17	450	32,05	15	1,78	1.394
8	“ “ Lor	1.617	70,60	627	27,30	53	2,30	2.297
9	“ Soko	805	68,69	364	31,06	3	0,26	1.172
10	“ Duwet	1.092	73,78	375	25,34	13	0,88	1.480
11	“ Yosorejo	1.342	64,24	647	33,70	44	2,06	2.033
Jumlah		19.718	80,73	4.440	18,18	268	0,53	24.426

Sumber: Kantor Sosial Politik Kota Pekalongan.

Keterangan : Kelurahan / Desa Basis PPP (Islam)

Tabel 3.2
Perbandingan Perolehan Suara dalam Pemilu 1992 dan 1997
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah TK II
Untuk Wilayah Daerah Kota Pekalongan

no	Kecamatan	Perolehan Suara OPP Pemilu 92						Perolehan Suara OPP Pemilu 97					
		PPP	%	Golkar	%	PDI	%	PPP	%	Golkar	%	PDI	%
1	Pekalongan Barat	16.296	40,52	16.064	38,39	8.092	20,19	26.305	56,17	19.893	42,48	835	1,35
2	Pekalongan Utara	10.480	31,75	13.871	42,04	8.594	20,21	18.195	49,07	18.007	48,56	880	2,37
3	Pekalongan Timur	13.069	41,36	11.176	35,35	7.368	23,29	19.576	58,46	13.238	39,54	870	2,00
4	Pekalongan selatan	14.233	66,37	4.487	20,94	2.718	12,69	19.718	80,73	4.440	18,18	4.440	0,53
jumlah		54.078	42,82	45.604	35,91	28.859	21,27	83.794	59,08	55.578	39,19	55.578	1,73

Dari data perolehan suara di Kota Pekalongan (tabel 3.1) jumlah pemilih keseluruhan berjumlah 141.805 pemilih. Pemilih yang memberikan suaranya untuk PPP berjumlah 83.772 atau 59,07 % dari keseluruhan hasil suara yang diberikan pemilih. Sisa suara diberikan untuk Golkar dan PDI. Wilayah-wilayah kecamatan yang menjadi basis PPP telah memenangkan PPP dalam Pemilu sehingga berdasarkan sistem proporsional PPP berhak menempatkan wakilnya di DPRD tingkat II sebanyak 13 orang

Dari hasil yang diperoleh PPP kembali memperoleh suara terbanyak dalam pemilu 1997 di Kota Pekalongan, bahkan mengalami peningkatan suara dibandingkan dengan pemilu 1992 (tampak dalam tabel 3.2). Kenaikan perolehan suara PPP mencapai 16,26 % atau selisih 29.716 suara.

Perolehan suara PPP tahun 1997 dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain:

1. Birokratisasi politik dan deferensiasi sosial

Birokratisasi awal masa ORBA diawali dengan penyederhanaan partai-partai politik termasuk partai yang berasaskan Islam. Kebijakan ini melahirkan PPP dan PDI. Birokratisasi juga dilakukan melalui adanya keharusan menetapkan asas tunggal Pancasila. Birokratisasi bukan hanya berhenti pada penyederhanaan partai dan asas tunggal tapi juga melalui penciptaan wadah-wadah bagi ormas-ormas Islam seperti MUI tahun 1975 yang menghimpun ormas-ormas Islam termasuk Muhammadiyah dengan fungsi sebagai penghubung antara Ulama dengan pemerintah. Birokratisasi ini melahirkan kesadaran umat Islam bahwa bidang politik

bukan lagi sebagai satu-satunya jalan menyampaikan aspirasi. Deferensiasi sosial mengakibatkan pembagian-pembagian kelas dalam masyarakat. Berbagai kondisi ini menjadi salah satu faktor penghambat aspirasi umat Islam bagi PPP, karena aspirasi mereka mulai disalurkan di semua bidang kegiatan sosial⁹.

Birokratisasi politik dan differensiasi sosial yang menghambat aspirasi politik masyarakat Pekalongan menjadi salah satu alasan bagi PPP melancarkan program perbaikan sistem birokrasi pemerintah dan kesejahteraan sosial. Massa parpol memberikan perhatian bagi program PPP dengan harapan dapat diwujudkan melalui kepercayaan massa untuk memberikan suaranya dalam Pemilu bagi PPP.

2. Keputusan NU untuk kembali ke khittah 1926.

Keputusan NU untuk kembali ke khittah 1926, berarti NU telah menetralkan diri untuk tidak ikut serta berpolitik. Dampak keputusan ini bagi PPP adalah turunnya jumlah suara PPP sebab sebelumnya PPP didukung oleh sebagian besar pengikut kelompok NU. Penurunan jumlah suara PPP dalam Pemilu ORBA nampak pada kekalahan PPP di kota Pekalongan dalam pemilu tahun 1987 dengan perolehan suara bagi PPP 23.270 (31 %), Golkar 38.121 (50,94 %), dan PDI 13.445 (17,97 %)¹⁰ (bandingkan dengan tabel 3.1 perolehan suara PPP tahun 1997). NU kemudian lebih berorientasi ke bidang pendidikan dan sosial, terbukti

⁹ Sudirman Tebba, *Islam Orde Baru, Perubahan Politik Dan Keagamaan*, Yogya: Tiara Wacana, 1993, hlm. 31-32

¹⁰ Syamsuddin Harris, *Kecurangan dan perlawanan rakyat dalam Pemilu 1997*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan PPW-LIPI, 1999, hlm.46

dengan semakin banyak didirikan pondok pesantren, madrasah, dan organisasi sosial. Walaupun demikian tidak sepenuhnya NU melepaskan diri dalam kehidupan politik karena seringkali masih tampak keterkaitan NU dengan politik, seperti dalam lembaga-lembaga perwakilan, organisasi sosial politik dan birokrasi¹¹.

Kekalahan PPP tahun 1987 mendorong PPP untuk meningkatkan perolehan hasil suara dalam Pemilu di kota Pekalongan. Dalam pemilu 1992 dan 1997 tanpa dukungan nyata dari NU PPP berhasil meningkatkan perolehan hasil suara dengan bukti kemenangan PPP di kota Pekalongan dalam pemilu 1992 dan 1997.

3. Munculnya lapisan baru dalam kelompok politik Islam.

Di kalangan umat Islam telah muncul lapisan baru yang tidak tergabung dalam kelompok-kelompok politik Islam lama seperti kelompok-kelompok pendiri PPP, yaitu NU, Parmusi, PSII, dan Perti. Ketidakperpihakan mereka karena berdasar tingkat pendidikan dan profesi/ pekerjaan menjadikan mereka lebih dekat dengan kelompok-kelompok / organisasi profesional mereka, seperti : pengusaha, manajer, dokter, pengacara, peneliti, aktivis sosial dan sebagainya. Dalam hal ini PPP kurang melihat peluang bahwa lapisan-lapisan baru ini dapat menjadi pendukung setia PPP. PPP cenderung masih mempertahankan kelompok-kelompok pendiri dalam tubuh PPP dengan harapan dapat meningkatkan pengaruh bagi umat Islam lain untuk dapat memberikan

¹¹Sudirman Tebba. *op.cit.*, hlm. 42-43

aspirasinya bagi PPP. Kelompok-kelompok lapisan baru ini lebih suka untuk menyalurkan aspirasi politiknya bagi parpol yang memberikan masa depan terbaik bagi mereka. Perasaan yang tidak terikat pada PPP menjadikan basis PPP semakin terbatas¹². Namun demikian, keterbatasan kelompok pendukung PPP tidak terlalu mempengaruhi perolehan hasil suara PPP dalam Pemilu 1997. Hal ini disebabkan faktor keterikatan masyarakat Pekalongan terhadap Kiai masih mendominasi masyarakat kota Pekalongan yang mayoritas umat Islam dan satu-satunya parpol Islam masa Pemilu 1997 adalah PPP.

4. Perubahan wawasan politik umat Islam.

Perubahan wawasan politik umat Islam mempengaruhi perolehan suara PPP. Perubahan wawasan umat dari wawasan politik yang sektarian menuju wawasan politik yang non sektarian. Wawasan politik sektarian ialah pandangan politik yang menginginkan adanya politik formal Islam, seperti negara Islam atau partai Islam. Adanya partai Islam membuat wawasan politik umat jadi sektarian, sebab partai ini membagi kelompok-kelompok politik dalam masyarakat dari segi agama. Wawasan politik non sektarian membawa pada wawasan politik yang bersifat universal, tidak membedakan antara kelompok Islam dan bukan Islam. Sikap non sektarian menimbulkan keterbukaan PPP memungkinkan memperoleh dukungan dari kelompok luar muslim yang merasa bahwa aspirasinya lebih sesuai untuk disalurkan lewat PPP. Hal

¹²*ibid.*, hlm. 45-46

ini dapat dibuktikan pada waktu terjadi konflik di tubuh PDI dan Golkar dalam krisis kepercayaan, suara para pendukung diberikan bagi PPP sehingga berdampak pada kenaikan perolehan suara PPP tahun 1997. Walaupun kondisi PPP demikian, dalam kampanyenya PPP tetap menyatakan diri sebagai partai milik umat Islam, sehingga wawasan politiknya kembali pada sektarian dengan basis yang menjadi terbatas¹³.

5. Faktor internal PPP.

Dalam berpolitik, kehidupan internal organisasi politik mempengaruhi eksistensi organisasi tersebut, seperti halnya PPP. Hubungan PPP secara organisatoris kurang menunjukkan konsolidasi yang kuat, misalnya dalam hubungan antara pengurus PPP, kurangnya kemampuan dalam berorganisasi menimbulkan kurangnya rasa tanggung jawab akan kelangsungan partai. PPP juga seringkali kurang dapat mengakomodir aspirasi dan kepentingan umat yang senantiasa berubah. Kelemahan-kelemahan internal PPP dapat mengurangi kekuatan partai, walaupun para pendukung PPP sudah menunjukkan kelompok-kelompok masyarakat Islam, tetapi apabila kelemahan-kelemahan ini tidak diperhatikan akan merugikan PPP, karena tidak semua orang Islam akan selalu mendukung partai ini¹⁴.

6. Isu Golongan Putih.

Golongan putih adalah mereka yang mempunyai hak pilih dalam pemilu, tetapi sengaja tidak menggunakan hak pilihnya. Walaupun

¹³*ibid.*, hlm. 47-48

¹⁴*ibid.*, hlm. 44 - 45

presentasi pemilih golongan putih di kota Pekalongan sangat kecil, tindakan ini mempengaruhi perolehan suara yang dihasilkan oleh OPP termasuk PPP.

7. Basis PPP

Mayoritas masyarakat Islam di kota Pekalongan adalah pendukung PPP. Dengan demikian, basis PPP dari kota ini sangat kuat. Pengaruhnya yaitu suara PPP selalu unggul dalam pemilu ORBA, bahkan pada pemilu tahun 1992 kota Pekalongan merupakan wilayah satu-satunya di Jawa Tengah yang dimenangkan oleh PPP. Dalam tabel 3.1 dan 3.4 menunjukkan wilayah-wilayah mayoritas masyarakat Islam yang mendukung PPP.

Dukungan terhadap PPP tidak terlepas dari pengaruh para ulama. Para ulama merupakan tokoh-tokoh yang disegani dan dituruti fatwa-fatwanya bagi kaum muslim di kota Pekalongan. Peranan mereka dalam memberikan pembinaan lewat pengajian-pengajian yang diselenggarakan PPP.

Peringatan Harlah ke-24 PPP di Masjid Ar-Rahman, Kradenan, Pekalongan Selatan, ketua umum PPP Buya, berfatwa agar kemenangan PPP di Pekalongan pada 1992 tetap dipertahankan, bahwa kalau bisa ditingkatkan. Dengan fatwa ini menjelang pemilu 1997 hampir selama 1 bulan diisi dengan pengajian dari setiap desa secara bergantian. Materi pengajian umumnya untuk membangkitkan kesadaran massa PPP untuk kembali dalam wadah PPP. Pengajian dalam rangka harlah ini berakhir sampai menjelang di mulainya masa kampanye pemilu.

8. Pemekaran wilayah kota

Pemekaran wilayah kota Pekalongan, baik dari desa-desa yang berasal dari Kabupaten Pekalongan maupun Batang. Wilayah desa-desa ini mayoritas dihuni oleh warga PPP sehingga masuknya wilayah-wilayah baru ini semakin mendukung eksistensi PPP di kota Pekalongan.

9. Mega-Bintang

Perpecahan dalam tubuh PDI menghasilkan dua kepemimpinan PDI yang saling bertikai (Megawati dan Soerjadi). Berdasarkan amanat ketua PDI Megawati untuk tidak memilih PDI dalam pemilu menyebabkan para pendukungnya banyak yang menyalurkan aspirasi ke PPP. Akhirnya terbentuk koalisi Mega-Bintang yang sangat mendukung kekuatan bagi PPP.

B. PPP dalam pemilu tahun 1999 di kota Pekalongan

1. Persiapan

Sebelum mendaftar kembali di Lembaga Pemilihan Umum sebagai peserta Pemilu'99, PPP dalam perkembangannya telah melakukan Muktamar empat kali dan pernah melakukan perubahan lambang partai dari gambar Ka'bah (Pemilu 1997-1982) menjadi gambar bintang (Pemilu 1987-1997). Setelah melakukan Muktamar IV di Jakarta, 29 November -- 2 Desember 1998, muktamar mengamanatkan DPP untuk kembali ke azas Islam, maka lambang partaipun kembali ke gambar Ka'bah. Hasil Muktamar lainnya, adalah rbentuknya pengurus DPP.

Dalam menghadapi Pemilu 1999 PPP harus bersaing dalam perolehan suara dengan partai-partai Islam lain, baik yang sama-sama mencantumkan azas Islam maupun yang berazas Pancasila. Beberapa tokoh dalam partai-partai baru tersebut sebelumnya telah dikenal sebagai tokoh dan pengurus DPP¹⁵. Berbagai persiapan menjelang Pemilu 1999 dilaksanakan PPP melalui persiapan program kerja, strategi, perekrutan massa dan persiapan kampanye.

Dalam upaya meningkatkan eksistensi pada pemilu 1999 PPP membuat program-program kerja. Program-program PPP yaitu: bidang politik, ingin menegakkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD'45, memfusikan lembaga-lembaga politik, lembaga-lembaga tinggi negara, sehingga tercipta tatanan budaya politik yang sehat, serta meningkatkan hubungan luar negeri dengan tetap berpegang pada politik luar negeri yang bebas aktif. Bidang ekonomi, menyelamatkan kehidupan rakyat dengan pemenuhan kebutuhan pokok dan menciptakan lapangan kerja, mendorong proyek padat karya di berbagai sektor dan menyelamatkan harta serta keuangan negara dari praktek-praktek kolusi, korupsi dan Nepotisme. Bidang Hukum dan HAM, memperjuangkan peninjauan kembali terhadap produk perundang-undangan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD'45 serta memperjuangkan agar proses legalisasi dapat memperhatikan aspirasi rakyat. Bidang-bidang lain, seperti bidang kesejahteraan rakyat, pengentasan kemiskinan, pendidikan,

¹⁵Tim penelitian dan Pengembangan KOMPAS, *op.cit.*, hlm 161

Sosial budaya, pemberdayaan perempuan, kehidupan beragama, pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, pengembangan IPTEK, serta otonomi daerah dan pembangunan desa¹⁶.

Strategi PPP untuk memenangkan Pemilu 1999 antara lain dengan menerangkan bahwa PPP telah kembali ke fitrahnya dan berjuang untuk mengisi kehidupan bangsa dengan nilai-nilai *aqhlakul qarimah*, serta memperjuangkan kehidupan bangsa yang demokratis, yaitu meluruskan fungsi ABRI, DPR, Presiden dan lembaga-lembaga tinggi negara¹⁷.

Pada Pemilu 1999 pendukung PPP menyebar ke dalam partai-partai baru sehingga perolehan suara PPP menurun bahkan mengalami kekalahan. PPP berada di posisi ke-2 setelah PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) pimpinan Ibu Megawati (lihat tabel 3.3). Para pendukung PPP masih dari kalangan umat Islam kota Pekalongan. Masyarakat masih beranggapan bahwa PPP adalah penerus perjuangan panjang tokoh-tokoh Islam Indonesia.

Basis PPP Kota Pekalongan masih tetap berada di wilayah Pekalongan Selatan, Timur, Barat dan beberapa desa / kelurahan di Pekalongan Utara. Dengan demikian, persiapan PPP dalam perekrutan massa mulai diarahkan pada upaya untuk tetap mempertahankan kepercayaan masyarakat kota Pekalongan terhadap PPP dengan melakukan peningkatan kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti pengajian

¹⁶*ibid.*, hlm. 162-163

¹⁷*loc. Cit.*,

bagi ibu-ibu wanita Persatuan pembangunan, kegiatan forum komunikasi antara DPC-MPC, PAC dan PR (Dewan Pimpinan Cabang-Majelis Pertimbangan Cabang, Pengurus Anak Cabang dan Pengurus Ranting). Kegiatan lain yaitu peningkatan kinerja (vokal) anggota FPP dan DPRD¹⁸.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan Pemilu didasari oleh UU No. 2 th 1999 tentang parpol. Pemilu 1999 menandai keruntuhan ORBA. Partai Peserta Pemilu ada 48 parpol. Dalam UU ini dijelaskan adanya kebebasan berpolitik. Hal ini tercantum dalam Bab II pasal 2 (ay 1) UU parpol, bahwa sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 tahun dapat membentuk parpol¹⁹. Dengan keterbukaan ini parpol yang beraliran Islam mulai muncul kembali disamping partai agama non Islam dan nasionalis.

Seperti halnya masa-masa Pemilu di Indonesia, pelaksanaan Pemilu tahun 1999 diawali dengan masa kampanye. Ke-48 partai, termasuk PPP secara bergiliran melaksanakan kampanye. Satu perbedaan masa kampanye 1999 dengan masa kampanye tahun-tahun sebelumnya adalah ikut sertanya kelompok-kelompok independen yang bertindak sebagai pemantau Pemilu, misalnya KNIPP dan Forum rektor.

¹⁸Wawancara dengan KH. Machmud Masjkur, *op.cit.*,

¹⁹UU RI No. 2 th 1999 tentang Parpol yang memperbaharui UU No. 3 th 1985 tentang Parpol dan Golkar

Keikutsertaan kelompok ini sebagai wujud partisipasi untuk menciptakan Pemilu 1999 di Indonesia yang benar-benar jujur dan adil.

Para pemilih dalam Pemilu secara sukarela mendaftarkan dirinya ke lokasi-lokasi pendaftaran. Dari data yang diperoleh jumlah keseluruhan pemilih yang terdaftar di kota Pekalongan adalah 155.202 dengan rincian pemilih untuk Pekalongan Barat 52.437, Pekalongan Utara 36.142, Pekalongan Timur 38.528 dan Pekalongan Selatan 28.095. Jumlah TPS keseluruhan 374 buah²⁰.

3. Hasil perolehan suara PPP dalam pemilu 1999

Pemilu multi partai tahun 1999 menyebabkan PPP harus membagi suara dengan partai Islam lain. Tabel dibawah ini menunjukkan gambaran hasil tersebut:

Tabel 3.3

Perolehan Suara Pada pemilu 1999 per kecamatan
Untuk DPRD tingkat II

No	Partai	Kec. Utara		Kec. Selatan		Kec. Timur		Kec. Barat		Jumlah	
		Jum	%	Jum	%	Jum	%	Jum	%	Jum	%
1	PIB	42	0,11	15	0,06	46	0,14	38	0,08	141	0,09
2	KRISNA	35	0,09	13	0,05	30	0,09	23	0,05	101	0,07
3	PNI	79	0,20	19	0,07	33	0,10	64	0,14	195	0,13
4	PADI	22	0,06	0	0	6	0,02	6	0,01	34	0,02
5	KAMI	31	0,08	24	0,09	35	0,11	32	0,07	122	0,08
6	PUI	11	0,03	7	0,03	12	0,04	13	0,03	43	0,03
7	PKU	25	0,07	70	0,27	23	0,07	51	0,11	169	0,11
8	MASYUMI BARU	10	0,03	9	0,03	16	0,05	15	0,03	50	0,03
9	PPP	8.505	22,57	9.624	36,58	8.794	26,78	11.857	25,21	38.780	26,96
10	PSII	9	0,02	8	0,03	40	0,12	11	0,02	68	0,04
11	PDI-P	14.815	39,32	4.988	18,96	11.665	35,52	14.587	31,01	46.055	32,01

²⁰Kasospol, *Pemilu 1999*. Pekalongan: Kasospol, 1999

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

70

12	ABUL YATAMA	14	0,04	7	0,02	10	0,03	22	0,05	53	0,03
13	PKM	7	0,07	20	0,08	8	0,02	14	0,03	49	0,03
14	PDKB	66	0,17	8	0,03	65	0,20	130	0,28	269	0,19
15	PAN	3.478	9,23	1.206	4,58	3.012	9,17	4.893	10,40	12.589	8,75
16	PRD	37	0,10	20	0,08	42	0,13	140	0,30	239	0,17
17	PSII-1905	6	0,01	9	0,03	6	0,02	7	0,01	28	0,01
18	PKD	33	0,09	1	0,003	30	0,09	39	0,08	103	0,07
19	PILAR	1	0,003	2	0,008	1	0,003	0	0	4	0,002
20	PARI	2	0,005	2	0,008	5	0,01	5	0,01	14	0,009
21	MASYUMI	47	0,12	31	0,12	77	0,23	126	0,27	281	0,19
22	PBB	624	1,66	131	0,49	775	2,36	792	1,68	2.322	1,16
23	PSP	3	0,008	4	0,01	43	0,13	3	0,006	53	0,04
24	P. KEADILAN	229	0,61	104	0,39	276	0,84	427	0,91	1.036	0,72
25	PNU	55	0,14	50	0,19	41	0,12	72	0,15	218	0,15
26	PNI F. MARHAENIS	54	0,14	32	0,12	44	0,13	49	0,10	179	0,12
27	IPKI	22	0,06	10	0,03	16	0,05	15	0,03	63	0,04
28	P.REPUBLIK	26	0,07	25	0,09	11	0,03	51	0,11	113	0,09
29	PID	21	0,05	5	0,02	20	0,06	16	0,03	62	0,04
30	PNI M. MARHAEN	62	0,16	25	0,09	52	0,16	47	0,10	186	0,13
31	MURBA	17	0,04	4	0,01	13	0,04	1	0,002	35	0,02
32	PDI	46	0,12	25	0,09	54	0,16	61	0,12	186	0,13
33	GOLKAR	4.849	12,87	849	3,22	2.897	8,82	5.540	11,77	14.135	9,82
34	PARTAI PERSATUAN	111	0,26	106	0,40	100	0,30	154	0,33	471	0,33
35	PKB	3.897	10,34	8.666	32,94	4.263	12,98	7.202	15,31	24.028	16,70
36	PUDI	26	0,07	12	0,04	27	0,08	49	0,10	114	0,07
37	PNB	2	0,005	11	0,04	4	0,01	14	0,03	31	0,02
38	MKGR	13	0,03	7	0,03	5	0,01	17	0,03	42	0,03
39	PDR	81	0,21	34	0,12	39	0,11	86	0,18	240	0,17
40	P. CINTA DAMAI	8	0,02	9	0,03	13	0,04	24	0,05	54	0,03
41	PKP	111	0,29	45	0,17	47	0,14	175	0,37	378	0,26
42	SPSI	5	0,01	4	0,01	7	0,02	16	0,03	32	0,02
43	PNBI	18	0,05	5	0,02	15	0,04	35	0,74	73	0,05
44	PBI	53	0,14	14	0,05	76	0,23	50	0,11	193	0,13
45	SUNI	12	0,03	38	0,04	15	0,04	36	0,08	101	0,07
46	PND	43	0,11	6	0,02	22	0,07	19	0,04	90	0,06
47	PUMI	4	0,01	5	0,02	4	0,01	4	0,008	17	0,17
48	PPI	9	0,02	2	0,008	3	0,009	7	0,01	21	0,01
		37.676	100	26.311	100	32.838	100	47.035	100	143.860	100

Sumber : sekretariat PPD Kota Pekalongan

Keterangan :

: Partai Islam

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 3.4
Hasil Perolehan suara Pemilu tahun 1999 untuk 5 partai besar
Daerah Pemilihan Kota Pekalongan per wilayah Kelurahan/Kecamatan/Desa

No	KEC/KEL/DESA	Pemilih yang Terdaftar	Perolehan Suara									
			PPP		PDI-P		PAN		P. Golkar		PKB	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
I	PEKALONGAN BARAT											
1	Kel. Kraton Kidul	1.517	334	0,63	415	0,79	176	0,33	143	0,27	249	0,47
2	“ Kergon	4.620	814	1,55	1.507	2,87	538	1,02	259	0,49	589	1,12
3	“ Sapuro	3.600	417	0,79	1.525	2,90	245	0,46	439	0,83	326	0,62
4	“ Kebulen	2.879	1.268	2,41	713	1,35	178	0,33	190	0,36	306	0,58
5	“ Kramat Sari	3.704	710	1,35	836	1,59	598	1,14	441	0,84	499	0,95
6	“ Bendan	4.530	527	1,00	1.849	3,52	739	1,40	757	1,44	545	1,03
7	“ Podosugih	6.545	1.053	2,00	1.928	3,67	613	1,16	826	1,57	625	1,19
8	“ Medono	7.710	2.282	4,35	1.522	2,90	689	1,31	777	1,48	1.337	2,54
9	Desa Tirta	5.127	1.290	2,46	1.046	1,99	359	0,68	596	1,13	509	0,97
10	Desa Tegal Rejo	3.818	1.259	2,40	619	1,18	312	0,59	532	1,01	276	0,52
11	“ Bumirejo	866	108	0,20	427	0,81	19	0,03	125	0,23	102	0,19
12	“ Pringlangu	3.580	1.090	2,07	503	0,95	268	0,51	206	0,39	945	1,80
13	“ Pasirsari	3.941	705	1,34	1.693	3,22	159	0,30	249	0,47	894	1,70
	Jumlah	52.437	11.857	22,55	14.583	27,74	4.893	9,26	5.540	10,51	7.202	13,68
II	PEKALONGAN UTARA											
1	Kel. Panjang Wetan	10.025	1.600	4,42	5.456	15,09	638	1,76	1.483	4,10	353	0,97
2	“ Kandang Panjang	5.810	508	1,40	2.778	7,68	571	1,57	1.334	3,69	750	2,07
3	“ Dukuh	2.151	133	0,36	1.065	2,94	321	0,88	428	1,18	118	0,32
4	“ Kraton Lor	2.466	451	1,24	754	2,08	443	1,22	624	1,72	295	0,81
5	“ Krapyak Kidul	2.753	1.173	3,24	412	1,13	464	1,28	95	1,26	526	1,45
6	“ “ Lor	5.088	2.116	5,85	1.170	3,23	589	1,62	485	1,34	467	1,29
7	Desa Degayu	2.986	1.057	2,92	1.011	2,79	89	0,24	175	0,48	601	1,66
8	“ Pabean	2.040	767	2,12	585	1,61	245	0,67	40	0,11	506	1,40
9	“ Bandengan	2.925	700	1,93	1.584	0,32	118	0,32	185	0,51	281	0,77
	Jumlah	36.142	8.505	23,48	14.815	36,87	3.478	9,56	4.849	14,39	3.897	10,74

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

III	PEKALONGAN TIMUR											
1	Kel. Landungsari	6.652	1.032	2,67	696	1,80	171	0,44	186	0,48	401	1,04
2	“ Noyontaan	5.002	564	1,46	2.045	5,30	420	1,09	532	1,38	364	0,94
3	“ Keputran	3.120	729	1,89	797	2,06	305	0,79	220	0,57	213	0,55
4	“ Kauman	1.415	418	1,08	181	0,46	244	0,63	61	0,15	293	0,76
5	“ Sampangan	2.324	422	1,09	851	2,20	143	0,37	78	0,20	449	1,16
6	“ Sugihwaras	2.314	426	1,10	653	1,69	257	0,66	127	0,32	298	0,77
7	“ Poncol	5.139	821	2,13	1.866	3,09	412	1,60	448	1,25	346	0,71
8	“ Klego	4.343	1.448	3,75	1.193	4,84	617	1,06	482	1,16	277	0,89
9	Desa Dekoro	4.128	1.396	3,62	1.073	2,78	247	0,64	159	0,41	598	1,55
10	“ Gamer	2.006	368	0,95	858	2,22	56	0,14	98	0,25	278	0,72
11	“ Karangmalang	1.499	91	0,23	675	1,75	37	0,09	164	0,42	104	0,26
12	“ Baros	1.554	515	1,33	336	0,87	58	0,15	201	0,52	234	0,60
13	“ Sokorejo	2.032	564	1,46	441	1,14	45	0,11	141	0,36	408	1,05
Jumlah		38.528	8.794	22,76	11.665	30,20	3.012	7,77	2.897	7,47	4.263	11,00
IV	PEKALONGAN SELATAN											
1	Kel. Kradenan	4.082	2.346	8,35	248	0,88	177	0,63	94	0,33	926	3,29
2	“ Banyuurip Alit	2.726	325	1,15	199	0,70	57	0,20	34	0,12	1.826	6,49
3	Desa Banyuurip Ageng	2.674	413	1,47	263	0,93	33	0,11	24	0,08	1.733	6,16
4	“ Buaran	1.747	741	2,63	134	0,47	56	0,19	18	0,06	675	2,40
5	“ Jenggot	5.263	2.948	10,49	503	1,79	153	0,54	145	0,51	1.007	3,58
6	“ Kertoharjo	1.430	482	1,71	355	1,26	44	0,15	66	0,23	349	1,24
7	“ Kuripan Kidul	1.791	280	0,99	326	1,16	345	1,22	72	0,25	493	1,75
8	“ “ Lor	2.799	770	2,74	937	3,33	161	0,57	162	0,57	447	1,59
9	“ Soko	2.427	278	0,98	391	1,39	13	0,04	60	0,21	556	1,97
10	“ Duwet	1.712	548	1,95	445	1,58	45	0,16	42	0,14	384	1,36
11	“ Yosorejo	2.444	493	1,75	1.187	4,22	122	0,43	132	0,46	270	0,96
Jumlah		28.095	9.624	34,21	4.988	17,71	1.206	4,24	849	2,96	8.666	30,79

Sumber : Kantor sosial Politik Kota Pekalongan

Keterangan :

□ : Daerah Kelurahan / Desa yang dimenangkan PPP

Pada Pemilu 1999 partai peserta pemilu yang memperoleh suara terbanyak adalah PDI-P. Secara keseluruhan 5 partai yang memperoleh suara terbanyak adalah PDI-P, PPP, Golkar, PAN dan PKB. Jumlah suara kelima partai yang memperoleh suara terbanyak di kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel 3.4. Pemilu 1999 juga masih menunjukkan kekuatan PPP hal ini bisa dilihat dengan masih banyaknya daerah-daerah yang dimenangkan oleh PPP.

Penurunan suara PPP Kota Pekalongan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Motivasi Pendukung Parpol

Tiap-tiap individu pasti akan mempunyai motivasi dalam memilih parpol, baik motivasi politik, ekonomi, maupun ideologis. Pada umumnya motivasi politik diberikan bagi parpol yang memiliki potensi besar dapat duduk di pemerintahan. Motivasi ekonomi diberikan bagi parpol yang dapat menyejahterakan dirinya, sedangkan motivasi ideologis diberikan karena adanya keterikatan ideologis dengan partainya. Dengan faktor motivasi ini partai-partai menjadi sasaran aspirasi warga²¹.

2. Isu Golput (golongan putih)

Dalam Pemilu 1999 isu golput masih mewarnai kegiatan pemilu. Situasi krisis pada waktu sekitar pemilu 1997 menimbulkan gerakan reformasi dan mewujudkan pembaharuan pemerintahan melalui

²¹Wawancara dengan Bp. Rahardjo.A.S, sie Sosduk BPS, tanggal 30 Maret 2000

pemilu 1999. Sebagian besar warga masyarakat masih kurang dapat mempercayai keberadaan parpol sehingga pada akhirnya ada kecenderungan untuk memilih golput.

3. Kelemahan PPP

Kelemahan PPP terletak pada faktor internal PPP misalnya kurang membina hubungan baik antar pengurus maupun pendukung PPP.

4. Perubahan wawasan politik umat Islam.

Perubahan wawasan politik umat Islam akan tetap terjadi selama masih ada kesadaran umat Islam untuk berkembang. Perubahan wawasan politik umat Islam dengan didukung oleh banyaknya parpol semakin mendukung penurunan perolehan suara PPP, khususnya di kota Pekalongan. PPP juga masih menggunakan ide sektarian dalam kampanye. Misal selama kampanye Pemilu 1999 PPP masih tetap menggunakan isu sebagai satu-satunya partai Islam. Dengan demikian, pendukung PPP tetap terbatas. Sejak gerakan reformasi terjadi di Indonesia, dasar rasa nasionalis lebih menonjol dibandingkan ideologi sehingga banyak parpol Islam (selain PPP) membuka peluang bagi semua warga baik Islam maupun non Islam untuk menjadi pendukungnya. Keadaan seperti ini memperlemah kekuatan PPP dalam menarik simpati pendukungnya.

5. Kuatnya pemimpin lokal

Keterikatan masyarakat kota Pekalongan pada pemimpinnya (ulama) menyebabkan setiap perkataan pemimpin dianggap sebagai ibadah. Banyaknya partai Islam dalam pemilu 1999 menyebabkan setiap kelompok pemimpin Islam tidak seluruhnya memberikan suara bagi PPP. Dengan terpecahnya aspirasi pemimpin lokal, maka ikut terpecah pula aspirasi masyarakat kota. Dengan demikian, mengurangi dukungan bagi PPP²².

Dari uraian persiapan, pelaksanaan dan hasil, perolehan suara PPP dalam Pemilu 1997 dan 1999 dipengaruhi oleh berbagai faktor intern dan ekstern partai seperti kuatnya pemimpin lokal, basis PPP dan kelemahan organisasi. Strategi yang dilancarkan PPP dalam masa Pemilu 1997 cukup berhasil, hal ini tampak pada hasil perolehan suara PPP yang menyebabkan kemenangan PPP dalam Pemilu 1997. Namun demikian, tampaknya strategi PPP dalam Pemilu 1999 kurang berhasil, terlihat pada berkurangnya perolehan suara PPP dalam Pemilu 1999.

Kondisi PPP dalam Pemilu 1997 dan 1999 ini menunjukkan bahwa persiapan dan strategi menjelang kampanye bagi PPP turut menentukan kemenangan dan perolehan suara. Kemampuan merebut simpati massa memerlukan strategi secara pribadi buktinya walaupun PPP di Kota Pekalongan telah memiliki basis massa Islam yang kuat (Mayoritas masyarakat Kota Pekalongan Muslim) namun kurangnya kemampuan internal partai telah

²²Hasil wawancara dengan Bp. Maridjo, sie sospel Kecamatan Pekalongan Timur, tanggal 15 Maret 2000, Bp. Agus Tjiptono, sie sospel Kecamatan Pekalongan Barat, tanggal 14 Maret 2000



menyebabkan berbagai faktor eksternal partai berhasil merebut massa PPP yang berdampak merugikan PPP.



BAB IV

PENURUNAN PEROLEHAN SUARA PPP

DALAM PEMILU TAHUN 1999 DI KOTA PEKALONGAN

A. Faktor yang Mempengaruhi Perolehan Suara PPP

1. Faktor Pendukung Perolehan Suara PPP

Perpolitikan masyarakat kota Pekalongan dalam pemilu tampak didasari oleh akar kehidupan yang kompleks, yaitu pertama, aspek kehidupan seperti sosial, agama dan ekonomi, kedua, berkenaan dengan lembaga masyarakat dan politik seperti pesantren, kiai, industri, negara atau pemerintah, parpol dan organisasi massa (ormas), ketiga berkaitan dengan pola perilaku masyarakat, seperti persaingan, konflik, kerjasama dan perubahan¹. Dengan demikian peningkatan dukungan bagi PPP merupakan ekspresi dari tekad dan usaha masyarakat Kota Pekalongan yang agamis untuk mempertahankan dan meluaskan kemandirian atas dukungan perkembangan agama dan industri tradisional.

Kota Pekalongan secara historis dinyatakan sebagai “kantong Islam” telah menjadikan PPP sebagai pemenang Pemilu yang mampu menghadapi dominasi Golkar yang nota bene sebagai parpol pemerintah. Hal ini terlihat

¹ Syamsuddin Harris, *Kecurangan Dan Perlawanan Rakyat Dalam Pemilu 1997*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia Dan PPW-LIPI, 1999, Hlm 16

pada Pemilu 1992, kota Pekalongan menjadi satu-satunya daerah pemilihan yang dimenangkan oleh PPP².

Faktor-faktor pendukung perolehan suara PPP dalam pemilu di kota Pekalongan adalah :

1. Eksistensi partai lain

Campur tangan pemerintah dalam politik seringkali menghambat eksistensi partai-partai peserta Pemilu. Pemerintah yang memberikan aspirasi suaranya bagi Golkar menjadikan Golkar tampak sebagai parpol pemerintah, selanjutnya perlakuan pemerintah terhadap parpol lain kurang menunjukkan keadilan. Namun demikian, situasi ini tidak tampak terjadi di kota Pekalongan. Walaupun Golkar mendapat perlakuan istimewa oleh Pemda (sebagai wakil pemerintah pusat di daerah) eksistensi partai-partai di kota Pekalongan tumbuh atas kehendak masyarakat dan usaha partai sendiri untuk menumbuhkan kepercayaan massa partainya.

Kemenangan PPP menimbulkan keinginan Golkar untuk berusaha memperoleh suara terbanyak di wilayah kota Pekalongan khususnya dan di daerah Jawa Tengah , DIY, dan Jawa Timur pada umumnya karena wilayah-wilayah ini suara Golkar merosot. Kemerosotan perolehan suara Golkar disebabkan karena Golkar terlalu berambisi untuk menang sehingga berbagai program yang dilancarkan seringkali

²*Pemilu 1997, Jajak Pendapat dan Analisa*, Jakarta: Institut Studi Arus Informasi (ISAI), 1997, hlm. 76

sulit diterima partai lain. Sebagai partai pemerintah, Golkar mudah untuk mewujudkan programnya tanpa melihat kondisi masyarakat yang ada sehingga memunculkan perselisihan. Salah satu program “kuningisasi” di Kota Pekalongan dianggap sebagai ancaman langsung terhadap kelangsungan eksistensi politik yang relatif mampu dipertahankan oleh PPP selama ini³.

Ambisi Golkar untuk memenangkan Pemilu dengan program-program pemerintah ternyata tidak menjadikan masyarakat Pekalongan berpersepsi positif bahkan lebih berpersepsi negatif, akibatnya ambisi Golkar ini justru menguntungkan PPP karena masyarakat menjadi bersikap negatif terhadap Golkar. Persepsi negatif terhadap Golkar dan sikap positif terhadap PPP membentuk perilaku masyarakat Pekalongan dalam politik dan menjadikan PPP pemenang dalam Pemilu di kota Pekalongan.

Demikian pula perlakuan pemerintah terhadap PDI, situasi konflik dalam tubuh PDI telah memecah massa partai sehingga massa pendukung PDI banyak yang pindah ke partai lain yang lebih baik. Keadaan ini semakin menguntungkan PPP dengan semakin banyak massa pendukungnya.

2. Aspek sosial, politik, ekonomi dan budaya

Berbagai aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya melatar belakangi kenaikan suara PPP dalam Pemilu 1997. Masuknya

³*Ibid.*, hlm.77

modernisasi di lingkungan masyarakat kota Pekalongan membawa pengaruh demokratisasi dan liberalisasi. Pengaruh ini semakin meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kehidupan demokratis, tanpa ada campur tangan pihak lain serta adanya penghargaan bagi pendapat-pendapat mereka. Keadaan ini berpengaruh dalam penyaluran aspirasi masyarakat kota Pekalongan di Pemilu 1997. Masyarakat lebih memilih untuk menyalurkan aspirasinya di PPP sebagai perwujudan perilaku politik masyarakat Islam.

3. Peran Kiai

Masyarakat Pekalongan memiliki tradisi politik kiai yaitu mendukung partai Islam, maka secara umum mayoritas warga muslim di Pekalongan memberikan dukungan kepada PPP sebagai pewaris tradisi partai Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan kemenangan-kemenangan PPP selama periode pemilu ORBA, kecuali pada periode pemilu 1987. Pada pemilu 1997 PPP kembali memperoleh suara terbanyak bahkan mengalami puncak dibandingkan pemilu ORBA sebelumnya. Situasi ini menunjukkan bahwa dari 3 parpol yang menjadi OPP tahun 1997 PPP lebih memiliki eksistensi kuat di kota Pekalongan.

Di dalam pertemuan halaqoh ulama se-Jawa Tengah, dalam rangka peringatan harlah ke-24 PPP di Masjid Ar-Rahman Pekalongan, tanggal 28 Maret 1997 Ismail Hasan Metareum (Buya) ketua umum PPP memberikan fatwa agar kemenangan PPP di Pekalongan pada tahun 1992 tetap dipertahankan bahkan kalau bisa ditingkatkan.

Fatwa ini memberikan dorongan bagi kiai-kiai kharismatik untuk mempertahankan kemenangan PPP melalui pengajian-pengajian dan dakwah sehingga warga tertarik untuk masuk PPP, bahkan mereka menganggap bahwa semua kegiatan PPP yaitu pengajian wajib dikunjungi⁴. Keterlibatan ulama Pekalongan dalam kampanye juga berwujud pemberian petunjuk/nasehat kepada individu atau kelompok masyarakat dengan hadir di panggung atau tempat kampanye dan membaca doa sebagai bagian dari kampanye. Sikap kepatuhan masyarakat pada ulama (kiai) lebih dominan telah mengalahkan berbagai kebijakan pemerintah melalui Pemda⁵. Sikap masyarakat diwujudkan secara nyata pada perilakunya untuk meningkatkan suara dan mempertahankan kemenangan PPP dalam pemilu di Kota Pekalongan.

4. Basis-basis PPP

Di wilayah-wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan, Pekalongan Barat, Pekalongan Timur dan sebagian Pekalongan Utara telah menjadi pusat kegiatan masyarakat Islam. Wilayah pusat kegiatan masyarakat Islam ini kemudian berkembang menjadi basis-basis PPP yang merupakan partai Islam. Dalam perkembangannya basis-basis ini menjadi penyumbang suara terbanyak bagi PPP dan menjadikan PPP sebagai partai pemenang Pemilu ORBA di kota Pekalongan Dukungan

⁴ *Wawasan*, Sukses PPP di Pekalongan karena dukungan Kiai, 5 Juni 1997

⁵ Wawancara dengan ibu Rachmawati, pegawai kecamatan Pekalongan selatan, 14 Maret 2000

dari para Kiai terhadap para pemilih PPP semakin meningkatkan motivasi simpatisan PPP (tampak dalam tabel 3.1 dan 3.4).

2. Faktor Penghambat perolehan suara

Sejak menjadi parpol PPP juga mengalami banyak hambatan dalam usaha memperoleh suara. Hambatan perolehan suara muncul dari dalam partai maupun dari luar partai. Adapun faktor penghambat tersebut:

1. Campur tangan pemerintah

Campur tangan pemerintah dalam kehidupan politik Islam tampak dengan dijalankannya : TAP No. II MPR 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), UU No. 3 Th. 1985 tentang Partai Politik dan Golkar yang menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan UU No. 8 Th. 1985 yang mengatur tata kehidupan organisasi sosial dan politik⁶. Dampak peraturan 1985 ini PPP mengganti tanda gambarnya yang semula gambar ka'bah menjadi gambar bintang dari lambang negara Pancasila. Perubahan tanda gambar ini menjadikan PPP terlihat bukan partai Islam.

Penetapan Pancasila sebagai azas telah mengurangi eksistensi PPP sebagai parpol Islam karena telah menimbulkan kebingungan mengenai bentuk aspirasi umat Islam dan wadah penyalurannya⁷. Politisasi

⁶ Abdul Munir Mulkan, *Perubahan perilaku politik dan polarisasi Ummat Islam 1965 - 1987 dalam perspektif sosiologis*, Jakarta : CV. Rajawali, April 1989, hlm dapat dipelajari lebih lanjut tentang politik dan masyarakat Islam.

⁷ Sudirman Tebba, *Islam Orde Baru*, Yogyakarta: Tiara Wacana, Maret 1993, hlm 4, menunjukkan proses perubahan politik Islam terutama masa ORBA

pemerintah diwujudkan pula dalam peraturan-peraturan pemilu seperti paket pemilu dalam PP No. 10 tahun 1996 tentang kampanye dan SK Menpen 012/1996 tentang penggunaan media massa pemerintah untuk kampanye. Peraturan-peraturan ini telah membatasi kebebasan pemilu sebagai pesta demokrasi yang seharusnya menjadi pesta yang menyenangkan bagi masyarakat. Dampak politisasi menimbulkan reaksi masyarakat lokal yang berdampak pada timbulnya konflik⁸.

Campur tangan pemerintah ini mempengaruhi sikap masyarakat dalam Pemilu untuk memilih partai-partai yang menjadi korban politisasi dan birokratisasi pemerintah. Campur tangan pemerintah semakin menghambat usaha partai dan merugikan perkembangan partai-partai karena aturan-aturan yang membatasi dan wajib dipatuhi.

2. Kekuatan partai lain

Isu Golput, perubahan wawasan politik masyarakat, kekuatan pemimpin lokal partai dan motivasi ekonomi dan politik membentuk kekuatan partai. Dalam Pemilu 1999 PPP tidak dapat mempertahankan peningkatan suaranya. Dengan latar belakang perubahan wawasan politik masyarakat, kekuatan pemimpin lokal partai dan motivasi politik telah memberikan kekuatan pendukung Mega yang semula memberikan suaranya bagi PPP kembali ke PDI dengan membentuk partai PDI-Perjuangan (PDI-P).

⁸Wawancara Dengan KH. Machmud Masjkur, Ketua DPC PPP Kota Pekalongan periode 1995-2000, 1 februari 2000

Menjelang Pemilu, partai-partai berkeinginan pula untuk memperoleh suara terbanyak dalam Pemilu. Tiap-tiap partai berupaya mewujudkan program kerjanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Usaha tersebut antara lain pemberian bantuan-bantuan ekonomi seperti bantuan kredit usaha, dan bantuan-bantuan untuk peningkatan kesejahteraan.

3. Banyaknya partai Islam.

Kebebasan berpolitik masa Pemilu setelah ORBA menimbulkan banyak partai di Indonesia. Dari ke 48 partai yang ada, diantaranya terdapat partai-partai Islam. Kehadiran partai-partai Islam mengurangi kekuatan PPP untuk tetap menjadi partai tunggal milik umat Islam. Di kota Pekalongan mayoritas masyarakat muslim Pekalongan lebih suka memilih PPP karena keislamannya, namun kehadiran partai-partai Islam mengakibatkan dukungan masyarakat terhadap PPP terbagi. Dukungan yang diberikan bagi partai-partai Islam selain PPP karena partai-partai ini dianggap sebagai saluran politik baru bagi umat Islam setelah peran politik mereka selama ORBA tidak mendapat kebebasan.

Pada dasarnya, kriteria sebuah partai Islam sulit untuk dapat didefinisikan. Berdasarkan jajak pendapat umum yang dilakukan TEMPO edisi 12-18 Januari 1999 dapat diketahui bahwa penilaian sebuah partai Islam dilihat dari pemimpinnya 36%, lambangnya 22 %, asasnya 19 %, programnya 12 %, namanya 9 % dan lain-lain 2 %⁹.

⁹PENDAPAT, Kumpulan Tulisan Pada Rubrik Opini dan Rubrik Monitor Majalah Berita Mingguan TEMPO, Jakarta: Arsa Raya Perdana, 1999, hlm. 185-186

Pendapat ini merupakan hasil perilaku masyarakat (Muslim) dalam menghadapi kehadiran banyak partai Islam sebagai parpol dalam Pemilu.

B. Perbandingan Perolehan Suara PPP dalam Pemilu 1997 dan 1999

Perolehan suara PPP di kota Pekalongan dalam Pemilu mengalami proses perubahan. Perubahan perolehan suara antara lain dapat dilihat dari hasil perolehan suara PPP dalam Pemilu 1997 dan 1999 (tampak dalam tabel 4.1).

Tabel 4.1
Perbandingan Perolehan Suara PPP dalam Pemilu 1997 dan 1999
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah TK II
Untuk Wilayah Daerah Kota Pekalongan

No	Kecamatan	Perolehan Suara PPP Pemilu 1997			Perolehan Suara PPP Pemilu 1999		
		Suara PPP	Total Suara	%	Suara PPP	Total Suara	%
1	Pekalongan Barat	26.305	46.833	56,17	11.857	47.035	25,21
2	Pekalongan Utara	18.195	37.060	49,10	8.505	37.676	22,57
3	Pekalongan Timur	19.576	33.486	58,46	8.794	32.838	26,78
4	Pekalongan Selatan	19.718	24.426	80,73	9.624	26.311	36,58
Jumlah		83.794	141.805	59,09	38.780	143.860	26,96

Sumber: kasospol Pekalongan

Hasil perolehan suara PPP dalam Pemilu 1997 sebesar 83.794 (59,09 %). Perolehan suara PPP jika ditinjau dari masing-masing kecamatan adalah, wilayah Kecamatan Pekalongan Barat 26.305 (56,17 %), Kecamatan Pekalongan Utara 18.195 (49,10 %), Kecamatan Pekalongan Timur 19.576 (58,46 %) dan Kecamatan Pekalongan Selatan 19.718 (80,73 %). Sedangkan hasil perolehan suara PPP dalam Pemilu 1999 sebesar 38.780 (26,78 %). Pemilu 1999 perolehan suara PPP dari wilayah Kecamatan Pekalongan Barat 11.857 (25,21 %), Kecamatan Pekalongan Utara 8.505 (22,57 %), Kecamatan Pekalongan Timur 8.794 (26,78 %) dan Kecamatan Pekalongan Selatan 9.624 (36,58 %).

Pada Pemilu 1999 di kota Pekalongan PPP mengalami penurunan perolehan suara disetiap kecamatan dengan total penurunan suara PPP sebanyak 32,13 % atau selisih 45.014. Penurunan ini bisa dilihat dari perbandingan prosentase perolehan suara pada pemilu tahun 1997 dan 1999. Pada Pemilu 1997 total perolehan suara 141.805 PPP mendapat suara 83.794 atau 59,09 % dari total perolehan suara. Sedangkan pada Pemilu 1999 total suara sebanyak 143.860 dan PPP mendapat 38.780 suara atau 26,96 % dari total perolehan suara. Dari perbandingan perolehan suara PPP dalam Pemilu 1997 dan 1999 menunjukkan bahwa PPP kota Pekalongan mengalami suatu penurunan perolehan suara yang sangat banyak karena faktor intern dan ekstern PPP yang mengakibatkan berkurangnya pendukung PPP. Dengan jumlah suara PPP pada pemilu 1999 PPP tersebut berhak menempatkan wakilnya di DPRD tingkat II sejumlah 7 orang dari 27 kursi yang tersedia di DPRD tingkat II.

Dari berbagai faktor pendukung dan penghambat perolehan suara PPP masa Pemilu 1999 dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang menjadi penyebab penurunan perolehan suara PPP dalam Pemilu 1999 adalah faktor banyaknya parpol dan besarnya peran kiai. Banyaknya parpol telah menyebabkan suara bagi PPP terbagi dengan parpol lain terutama parpol Islam. PPP pada mulanya merupakan satu-satunya parpol yang menampung aspirasi masyarakat muslim dalam pemilu, namun dengan lahirnya banyak parpol terutama parpol Islam PPP tidak lagi menjadi satu-satunya parpol Islam. Berdasarkan berbagai latar belakang fisiologis, lingkungan maupun psikologis masyarakat muslim di kota Pekalongan memilih suatu parpol.

Penurunan perolehan suara PPP di kota Pekalongan ditunjukkan melalui perbandingan perolehan suara 1997 dan 1999 yang menggambarkan suara PPP menurun sangat besar. Dengan penurunan perolehan suara ini PPP hanya berhak menempatkan 7 orang wakil di DPRD. Kondisi ini mengakibatkan kerugian bagi PPP karena berkurangnya pengaruh PPP dalam pemerintahan.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB V

KESIMPULAN

Perolehan suara PPP di kota Pekalongan dilatarbelakangi oleh kondisi geografis, sosial, politik, ekonomi dan budaya. Menjelang pelaksanaan Pemilu tahun 1997 dan 1999 kondisi kota Pekalongan lebih didominasi oleh faktor politik. Berdasarkan kondisi geografis, kota Pekalongan terletak pada suatu wilayah strategis yang memudahkan keluar masuknya ide-ide baru yang dibawa oleh para pendatang yang singgah. Keadaan ini mempengaruhi pola pikir masyarakat terlebih didukung oleh kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Kota Pekalongan yang majemuk. Kemajemukan latar belakang masyarakat menimbulkan kekayaan sumber daya manusia kota Pekalongan, namun seringkali kemajemukan menjadi faktor utama konflik. Hal ini tidak terlepas dari peran kaum elit birokrat dan ulama yang merupakan kelompok kuat masyarakat di Kota Pekalongan. Dominasi faktor politik dalam masa menjelang Pemilu 1997 dan 1999 tampak pada keikutsertaan para elit birokrat dan ulama dalam setiap kegiatan sosial, ekonomi dan budaya dengan alasan sebagai wakil parpol. Dengan demikian, kondisi kota tidak lagi berasal dari pola pikir dan nilai tradisi masyarakat tetapi telah menjadi milik parpol. Perpolitikan di Kota Pekalongan telah mempengaruhi kondisi masyarakat menjelang Pemilu. Pada masa Pemilu 1999 kondisi politik yang mempengaruhi berbagai faktor kehidupan masyarakat telah mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing parpol.

Dalam menghadapi pemilu 1997 dan 1999 PPP melakukan tahap persiapan yang meliputi strategi, perekrutan kader, kampanye, dan persiapan

intern partai. Pelaksanaan Pemilu diawali dengan sosialisasi program kerja partai dan konsolidasi massa melalui kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti pengajian, dakwah, serta kegiatan sosial seperti pemberian bantuan-bantuan bagi masyarakat. Menjelang pelaksanaan Pemilu 1999 konsolidasi massa dan kader semakin ditingkatkan dengan peningkatan kegiatan pengajian dan dakwah. Pemilu tahun 1999 merupakan Pemilu multi partai yang diikuti banyak partai termasuk partai yang berazas Islam. Akibat banyaknya partai yang berazaskan Islam maka aspirasi warga Islam terbagi pada partai-partai yang berazaskan Islam. Aspirasi masyarakat juga dipengaruhi oleh latar belakang perubahan wawasan politik masyarakat, kekuatan pemimpin lokal partai, motivasi ekonomi dan motivasi politik yang menjadikan alasan untuk memilih partai. Keadaan ini menyebabkan dalam pemilu 1999 perolehan suara PPP di kota Pekalongan mengalami penurunan, bahkan kedudukannya menjadi kedua dibawah PDI-P. Penurunan suara PPP dalam Pemilu 1999 bukan berarti kekalahan bagi PPP karena PPP masih mempunyai esistensi di kota Pekalongan dibanding partai Islam lainnya.

Kenaikan dan penurunan perolehan suara PPP di Kota Pekalongan telah menunjukkan dinamika suatu partai bahwa tidak ada partai yang selamanya dapat mendominasi perpolitikan dan menjadi penguasa dalam pemerintahan. Proses perubahan sosial yang menyangkut aspek perubahan perilaku masyarakat telah menjadi faktor utama kenaikan dan penurunan perolehan suara PPP di kota Pekalongan. Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan pengaruh bagi aspek-aspek perilaku masyarakat. Kecenderungan kenaikan dan penurunan perolehan suara PPP sangatlah

berhubungan erat dengan perkembangan sosial masyarakat, termasuk tata nilai dan pola pikir mereka yang menjadikan dasar untuk berperilaku termasuk dalam memilih partai.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

DOKUMEN

- BPS, *Kotamadia Pekalongan dalam Angka 1997*, Pekalongan: BPS, 1998
- _____, *Kotamadia Pekalongan dalam Angka 1998*, Pekalongan: BPS, 1999
- Data Pemilu 1997*, Pekalongan: sekretariat PPD
- Kasospol, Pemilu 1997*, Pekalongan: kasospol, 1997
- Kasospol, Pemilu 1999*, Pekalongan: kasospol, 1999
- Keputusan-keputusan Muktamar IV PPP*, Jakarta: INIS, 1988
- Pekalongan Selatan dalam Angka, 1995*, Pekalongan: Kecamatan Pekalongan Selatan, 1996

BUKU

- Abdul Munir Mulkan, *Perubahan Perilaku Politik dan polarisasi umat Islam 1965-1987 dalam perspektif sosiologis*, Jakarta: CV. Rajawali, 1989
- Apakah Demokrasi itu?*, United State Information Agency, 1991
- Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1980
- Gibson, Ivancevich, Donnely, *Organisasi dan Manajemen (Perilaku Struktur proses)*, Jakarta: Erlangga, 1984
- Gottschalk, Louis, *Mengerti Sejarah*, Terj: Nugroho Notosusanto, Jakarta: UI-Press
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam, Interpretasi untuk Aksi*, Bandung: Mizan, 1991
- _____, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Bentang Budaya, 1997
- _____, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994
- Mangunwijaya, YB. *Merintis RI yang Manusiawi, Republik yang adil dan beradab*, Jakarta: Erlangga, 1999

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Mirriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1982

Liddle R. William, *Pemilu-pemilu ORBA, pasang surut kekuasaan politik*, Jakarta: LP3ES, 1992

Pemilu 1997, Jajak Pendapat dan Analisa, Jakarta: Institut Studi Arus Informasi (ISAI), 1997

Pendapat, Kumpulan Tulisan pada rubrik Opini dan rubrik Monitor majalah berita mingguan TEMPO, Jakarta: Arsa Raya Perdana, 1999

Riswandha Imawan, *Membedah Politik ORBA*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997

Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan ilmu-ilmu sosial dalam metodologi sejarah*, Jakarta: Gramedia 1993

Sudirman Tebba, *Islam Orde Baru, Perubahan politik dan keagamaan*, Yogya: Tiara Wacana, 1993

Syamsuddin Harris, dkk, *kecurangan dan perlawanan rakyat dalam Pemilu 1997*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan PPW-LIPI, 1999

Tim Penelitian dan pengembangan KOMPAS, *Partai-partai politik Indonesia, Ideologi, Strategi dan Program*, Jakarta: Gramedia, 1999

Umaidi Raidi, *Strategi PPP suatu studi tentang kekuatan politik Islam tingkat Nasional*, Jakarta: Integrita Press, 1984

Zaini Muchtarom, *Santri dan Abangan di Jawa*, Jilid II, Jakarta: INIS, 1988

UNDANG-UNDANG

UU No 22 Mei th 1999 tentang Otonomi Daerah

UU RI No 2 th 1999 tentang Parpol

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

SURAT KABAR

Wawasan, 26 Maret 1997, Petugas berhasil atasi kerusuhan

Wawasan, 26 Maret 1997, Kami tidak terlibat peristiwa Pekalongan

Wawasan, 29 Maret 1997, Afan: Kasus Pekalongan puncak frustrasi masyarakat
Jateng

Wawasan, 29 Maret 1997, Pemilik Toko Masih Ngungsi

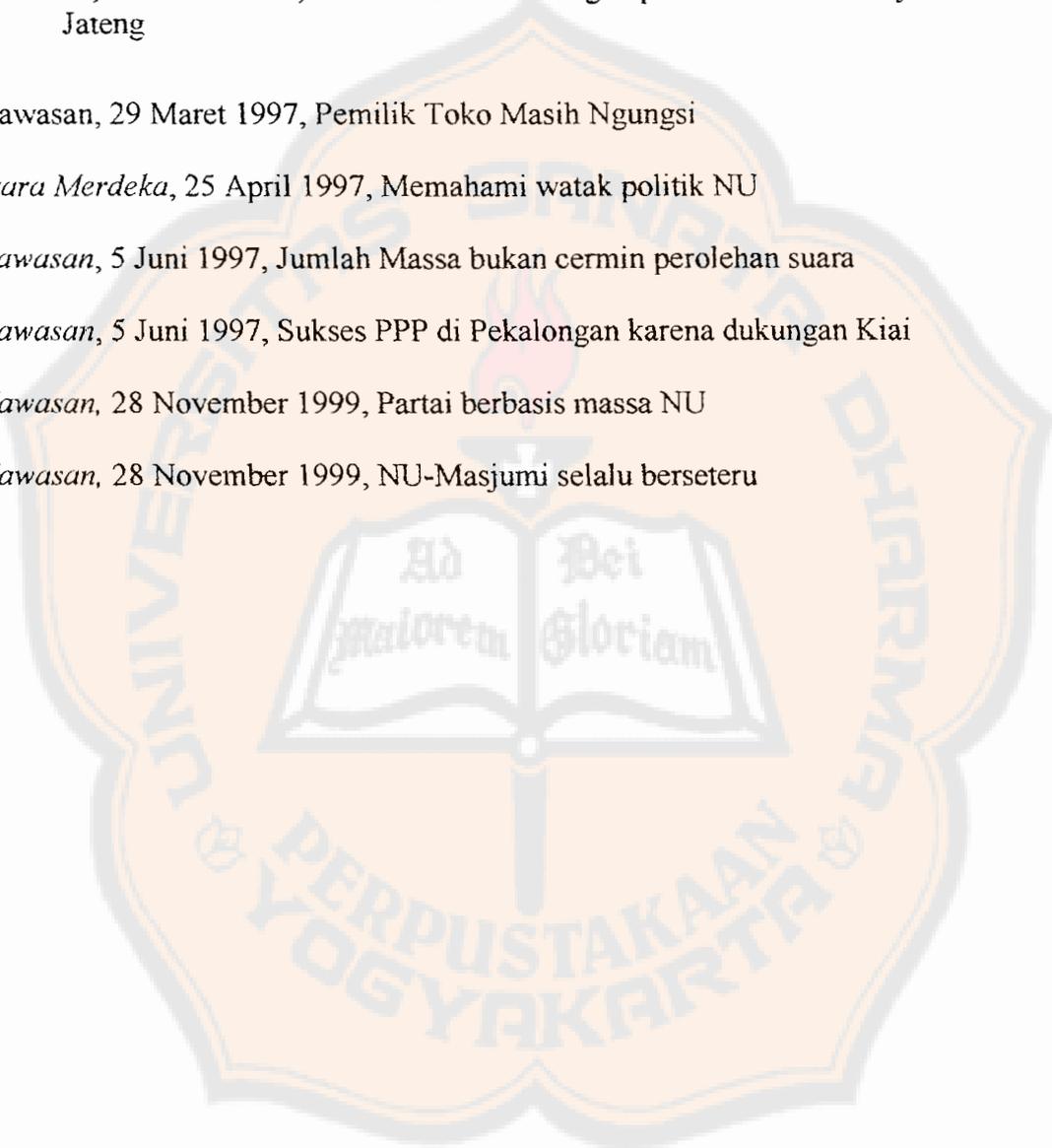
Suara Merdeka, 25 April 1997, Memahami watak politik NU

Wawasan, 5 Juni 1997, Jumlah Massa bukan cermin perolehan suara

Wawasan, 5 Juni 1997, Sukses PPP di Pekalongan karena dukungan Kiai

Wawasan, 28 November 1999, Partai berbasis massa NU

Wawasan, 28 November 1999, NU-Masjumi selalu berseteru

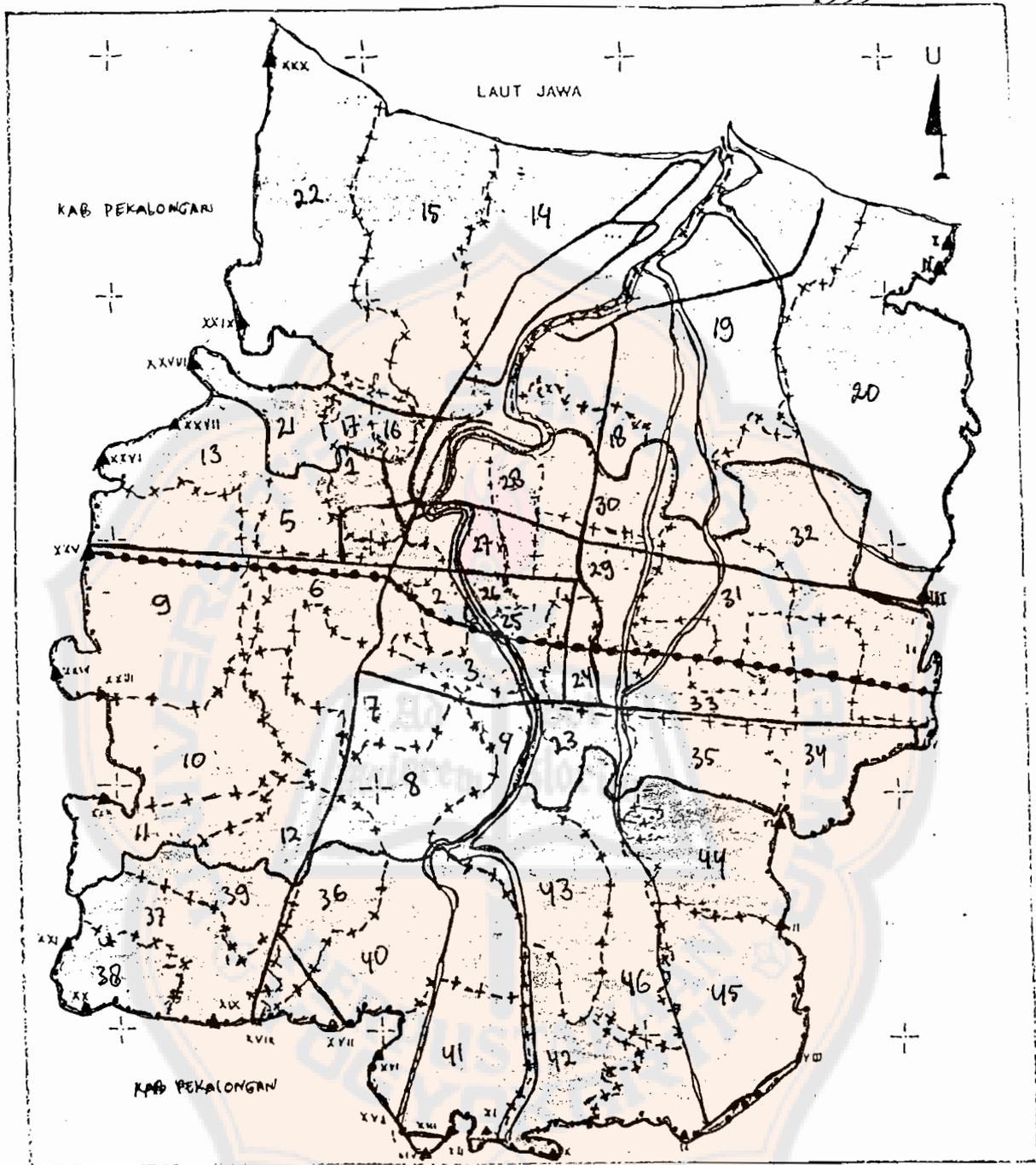


PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR INFORMAN

No	NAMA	L/P	Umur	Alamat	Pekerjaan
1.	KH. Machmud Masjkur	L	60 th	Kauman, gg 10 Pekalongan Timur	- Ketua DPC PPP Kota Pekalongan periode 1995-2000 - Anggota DPRD Tk II Kota Pekalongan
2	Rahardjo, A.S	L	50 th	JL. Pembangunan Pekalongan Barat	Sie Sosduk Biro Pusat Statistik
3	Maridjo	L	54 th	Landungsari, Pekalongan Timur	Sie Sospol Kecamatan Pekalongan Timur
4	Agus Tjiptono	L	54 th	Kramatsari, Pekalongan Barat	Sie Sospol Kecamatan Pekalongan Barat
5	Rachmawati	P	35 th	Kuripan, Pekalongan Selatan	Pegawai Kecamatan Pekalongan Selatan

PETA POLITIK KOTA PEKALONGAN 1999



Keterangan :

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> --- Batas Kota Dati II Pekalongan — Jln Aspal —••••• Jln Kereta Api ~ Sungai ○ Dimenangkan PPP ○ Dimenangkan P. Golkar | <ul style="list-style-type: none"> ▲ Patok Batas Wilayah iiiv Nomor Patok Batas Wilayah --- Batas Kecamatan -+--+ Batas Desa/Kelurahan ○ Dimenangkan PDI-P ○ Dimenangkan PKB |
|---|--|

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

I **PEKALONGAN** **BARAT**

- 1 Kel. Kraton Kidul
- 2 “ Kergon
- 3 “ Sapuro
- 4 “ Kebulen
- 5 “ Kramat Sari
- 6 “ Bendan
- 7 “ Podosugih
- 8 “ Medono
- 9 Desa Tirto
- 10 Desa Tegal Rejo
- 11 “ Bumirejo
- 12 “ Pringlangu
- 13 “ Pasirsari

II **PEKALONGAN** **UTARA**

- 14 Kel. Panjang Wetan
- 15 “ Kandang Panjang
- 16 “ Dukuh
- 17 “ Kraton Lor
- 18 “ Krapyak Kidul
- 19 “ “ Lor
- 20 Desa Degayu
- 21 “ Pabean
- 22 “ Bandengan

III **PEKALONGAN** **TIMUR**

- 23 Kel. Landungsari
- 24 “ Noyontaan
- 25 “ Keputran
- 26 “ Kauman
- 27 “ Sampangan
- 28 “ Sugihwaras
- 29 “ Poncol
- 30 “ Klego
- 31 Desa Dekoro
- 32 “ Gamer
- 33 “ Karangmalang
- 34 “ Baros
- 35 “ Sokorejo

IV **PEKALONGAN** **SELATAN**

- 36 Kel. Kradenan
- 37 “ Banyuurip Alit
- 38 Desa Banyuurip Ageng
- 39 “ Buaran
- 40 “ Jenggot
- 41 “ Kertoharjo
- 42 “ Kuripan Kidul
- 43 “ “ Lor
- 44 “ Soko
- 45 “ Duwet
- 46 “ Yosorejo

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA**

Mrican, Tromol Pos 29 Yogyakarta 55002. Telp (0274) 513301, 515352 Fax: 562383

Nomor : 597 /Pnl/Kajur/PIPS/ II / 2000
Lamp. :
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth _____
SASDSEPOL Wilayah DIY
di YOGYAKARTA

Dengan hormat,

Dengan ini kami memohonkan ijin bagi mahasiswa kami.

Nama : ERENI KURNIYANTI
No. Mhs : 951314008
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Semester : X (Sepuluh)

untuk melaksanakan penelitian dalam rangka persiapan penyusunan Skripsi / Makalah, dengan ketentuan sebagai berikut:

L o k a s i : Kotamedia Pekalongan

W a k t u : Maret 2000

Topik / Judul : Partai Persatuan Pembangunan dalam Pemilu tahun 1997 dan tahun 1999 (Studi Kasus Perolehan Suara PPP dalam Pemilu 1997 dan 1999) di Kotamedia Pekalongan

Atas perhatian dan ijin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih

Yogyakarta, 26 Februari 2000
Dekan,
a. b. Ketua Jurusan PIPS.


Drs. Sutario Adisusilo I.R
NIP. 130 935 784

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

Nomor : 070/397
Hal : Keterangan

Yogyakarta, 29 Februari 2000
Kepada Yth.
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Propinsi Jawa Tengah
di SEMARANG

Up. Ka. DIT. SOSPOL

Menunjuk Surat : Ketua Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial USD Yogyakarta,

Nomor : 597/Pnlt/Kajur/PIPS/11/2000

Tanggal : 26 Februari 2000

Perihal : Ijin Penelitian.

Setelah mempelajari rencana penelitian / research design yang diajukan oleh peneliti, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : : FRENTI KURNIYANTI
Pekerjaan : Mhs. Universitas Sanata Dharma Jur. Pend. Ilmu Pengetahuan Sosial Yk.
No. Mhs. : 951314008
Alamat : d/a Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
Bermaksud : Mengadakan penelitian dengan judul, " PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DALAM PEMILU TAHUN 1997 DAN TAHUN 1999 (Studi Kasus Perolehan Suara PPP dalam Pemilu 1997 dan 1999) DI KOTAMADIA PEKALONGAN ".
Pembimbing : Drs. S. Adisusilo, J.R
Lokasi : Propinsi Jawa Tengah.

Peneliti berkewajiban menghormati / mentaati Peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.N. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala Direktorat Sosial Politik
Ub. PUH Kasubdit Ketertiban Umum

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur Kepda Istimewa Yogyakarta sebagai laporan.
2. Ketua BAPPEDA Propinsi DIY.
3. Ka. Jur. PIPS USD Yogyakarta ;
4. Ybs.



R. WIDJAJANTI
NIP. 490 0

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

~~PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH~~
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
JL. MENTERI SUPENO NO. 2 SEMARANG TELEPON 414205

Nomor : 070/1098 / III / 2000.
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Ijin Penelitian.

Semarang, 8 Maret 2000.

K E P A D A :
Yth. KETUA BAPPEDA PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
JL. PEMUDA NOMOR 132
DI --

S E M A R A N G.

Membaca surat Kasubdit Tib Um Dit Sospol DIY nomor 070/397 tanggal 29 Feb 2000 maksud Sdr. FRENTI KURNIYANTI mhs USD Yogya karta akan mengadakan penelitian tentang : " PARTAI PERSATUAN - PEMBANGUNAN DALAM PEMILIHAN UMUM 1997 DAN 1999 DI KOTAMADYA PEKALONGAN ", untuk skripsi

Lokasi : Kodia Pekalongan
Waktu : 9 Maret s/d 9 Mei 2000
Penanggung jawab : Drs. S. Adisusilo, J.R.

Dengan ini kami menyatakan tidak keberatan untuk diberikan Ijin Riset/Survey/Penelitian kepada pihak yang berkepentingan dengan mematuhi semua peraturan dan perundangan yang berlaku.

Setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tesis/Skripsi/Karya Tulis/Laporan penelitiannya dalam batas waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, segera menyerahkan hasilnya kepada DIREKTORAT SOSIAL POLITIK PROPINSI JAWA TENGAH dan BAPPEDA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

Dalam pelaksanaan tersebut diwajibkan ikut membantu keamanan dan ketertiban umum masyarakat dan mematuhi tata tertib serta ketentuan-ketentuan kehidupan yang berlaku di daerah setempat.

KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
PROPINSI JAWA TENGAH
DIREKTORAT
SOSIAL POLITIK
S. PRAYITNO



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda No. 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802
 Kode Pos 50132 e - mail : bppdjtg @ indosat.net.id
 Semarang

Semarang, 8 Maret 2000

Kepada Yth. :

Nomor : R/ 1007/P/III/2000
 Lampiran : 1 (satu) lembar.
 Perihal : Pemberitahuan tentang
 Pelaksanaan Research /
 Survey.

Walikota. Pekalongan....

Menarik Surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Jawa Tengah, tanggal :
 8. Maret. 2000..... Nomor : R/1007/P/III/2000..... dengan
 hormat kami memberitahukan dalam Wilayah Saudara akan dilaksanakan Research / Survey
 atas nama :

.....FRENTI. KURNIYANTI.....

Dengan maksud tujuan sebagaimana tersebut dalam surat Rekomendasi Research / Survey
 BAPPEDA Jateng (terlampir).

Besar harapan kami, agar Saudara mengambil langkah-langkah persiapan seperlunya,
 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

AN. GUBERNUR JAWA TENGAH

KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

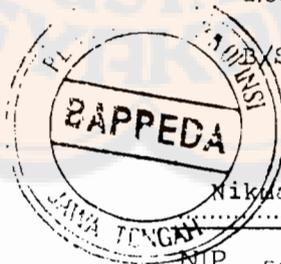
u.b. Kabid Litbang

Staff. Sie PPS

Nikmahtul Kh, SH

NIP. 500 080 173

NO. 1007/P/III/2000
 8 MARET 2000
 MENCANTUMI
 KASITIBUM,
 NAMA
 NIP. 500 080 173



TEMBUSAN Kepada Yth. :
 Sdr. Pembantu Gubernur Untuk
 Wilayah : Pekalongan

Arsip



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda No. 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802
Kode Pos 50132 e - mail : bppdjtg @ indosat.net.id
Semarang

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R / 1007/P/III/2000

- I. DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.
- II. MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
tgl. 8 Maret 2000 no. 070 / 1098/III/2000
2. Surat dari ...Kajur. PIPS. USD. Yogyakarta.....
tgl. 26 Februari 2000..... nomor ...597/Pnlt/Kajur/11/2000
- III. Yang bertanda-tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Jawa Tengah, bertindak atas nama Gubernur Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : FRENTI KURNIYANTI
 2. Pekerjaan : Mhs. USD Jur. PIPS YK
 3. Alamat : JL. Supriyadi no. 728 Tito, Pekalongan
 4. Penanggungjawab : Drs. S. Adisusilo, J.R
 5. Maksud tujuan : Untuk skripsi berjudul : PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
research/survey DALAM PEMILU TAHUN 1997 DAN 1999 (Studi kasus Perolehan Suara PPP dalam Pemilu 1997 dan 1999 di Kotamadia Pekalongan)
 6. Lokasi : Kotamadia Pekalongan

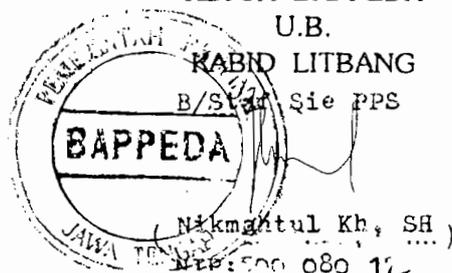
dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
 - b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
 - c. Setelah research / survey selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Jawa Tengah.
- IV. Surat Rekomendasi Research / Survey ini berlaku dari :
.....9 Maret s/d 9 Mei 2000.....

Dikeluarkan di : S E M A R A N G
Pada tanggal : 8 Maret 2000
A.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
KETUA BAPPEDA
U.B.

TEMBUSAN :

1. Bakorstanasda Jateng / DIY.
2. Kapolda Jateng.
3. Kadit Sospol Pemerintah Prop. Jawa Tengah
4. Bupati/Walikota.....
.....Pekalongan.....
- 5.- Arsip.



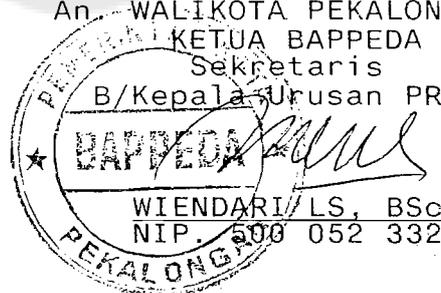
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)
Jalan Mataram Nomor 1 Telepon (0285) 23223 Pekalongan

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY
NOMOR : 070/134/III/2000

- I. D A S A R : Surat Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah, tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/1972
- II. MENARIK : 1. Surat dari Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Jateng tgl. 8 Maret 2000 no : 070/1098/III/2000
2. Surat dari Ka. Jur. PIPS USD Yogyakarta tgl : 26 Pebruari 2000 no : 597/Pnlt/Kajur/II/2000
3. Surat dari Bappeda Propinsi Jateng tanggal 8 Maret 2000 nomor : R/1007/P/III/2000
4. Surat dari Kantor Sospol Kota Pekalongan tgl. 9 Maret 2000 nomor : 070/376/III/2000
- III. Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Bappeda Kota Pekalongan bertindak atas nama Walikota Pekalongan menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan RESEARCH/SURVEY di wilayah Kota Pekalongan yang dilaksanakan oleh :
1. N a m a : FRENTI KURNIYANTI
 2. Pekerjaan : Mahasiswa
 3. Alamat : Jl. Supriyadi No. 728 Tirto Pekalongan
 4. Penanggungjawab : Drs. S. ADISUSILO, J.R.
 5. Maksud tujuan : Untuk Skirpsi berjudul :
research/survey "PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DALAM PEMILU TAHUN 1997 DAN 1999 (Studi Kasus Perolehan Suara PPP dalam Pemilu 1997 dan 1999 di Kotamadya Pekalongan)."
 6. Lokasi : Kota Pekalongan
 7. Lamanya : Dari 9 Maret 2000 s/d 9 Mei 2000
- dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :**
- a. Pelaksanaan research/survey tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah
 - b. Sebelum research/survey, supaya lapor dahulu kepada pengawas wilayah atau Camat setempat
 - c. Apabila masa berlakunya Surat Rekomendasi ini telah habis sedangkan pelaksanaannya belum selesai, maka perpanjangan waktu harus diajukan kembali kepada Ketua Bappeda Kota Pekalongan
 - d. Setelah research/survey selesai, harus menyerahkan hasilnya kepada Ketua Bappeda Kota Pekalongan
- IV. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan - ketentuan seperti tersebut diatas.

Dikeluarkan di : PEKALONGAN
Pada tanggal : 10 Maret 2000

An. WALIKOTA PEKALONGAN
KETUA BAPPEDA
Sekretaris
B/Kepala Urusan PRK



Tembusan : Dikirim Kepada Yth.

1. Bpk. Walikota Pekalongan (sebagai laporan);
2. Sdr. Ka. Kan Sospol Kota Pekl;
3. Sdr. Camat Se Kota Pekalongan;
4. Sdr. Ka. BPS Pekalongan;
5. Sdr. Ka. Bag. Perekonomian Kota Pekl;
6. Sdr. DPC PPP Kota Pekalongan;
7. Sdr. FRENTI KURNIYANTI, Tsb;
8. A r s i p .